

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA SABANG
TAHUN 2007



Diterbitkan: Desember 2007
Data : Oktober 2006 - Oktober 2007



PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah
(BAPEDALDA) Kota Sabang**

Alamat : Jl. Paya Seunara Kota Sabang

Telp : (0652) 22597

Fax : (0652) 22497

E-mail : -

Web : -

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan perkenan-Nya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini dapat tersusun. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah pada dasarnya disusun untuk memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup daerah Kota Sabang secara menyeluruh.

Status Lingkungan Hidup Daerah ini mempunyai arti yang sangat penting bagi perencanaan atau kebijakan pembangunan yang berkelanjutan baik untuk skala daerah maupun nasional, karena Kota Sabang memiliki prospek pengembangan perdagangan dan wisata yang tumbuh berkembang, yang disisi lainnya akan menimbulkan dampak samping berupa beban terhadap lingkungan.

Dengan tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah ini, diharapkan pembangunan di Kota Sabang dapat terlaksana dalam bingkai pembangunan yang berkelanjutan melalui keseimbangan antara pembangunan itu sendiri dengan daya dukung lingkungan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kontribusi terhadap terselesainya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Sabang.

Terima kasih

Sabang, November 2007
Plt. KEPALA BAPEDALDA
KOTA SABANG

Ir. M. JAMINI
Pembina TK. I
NIP. 080 074937

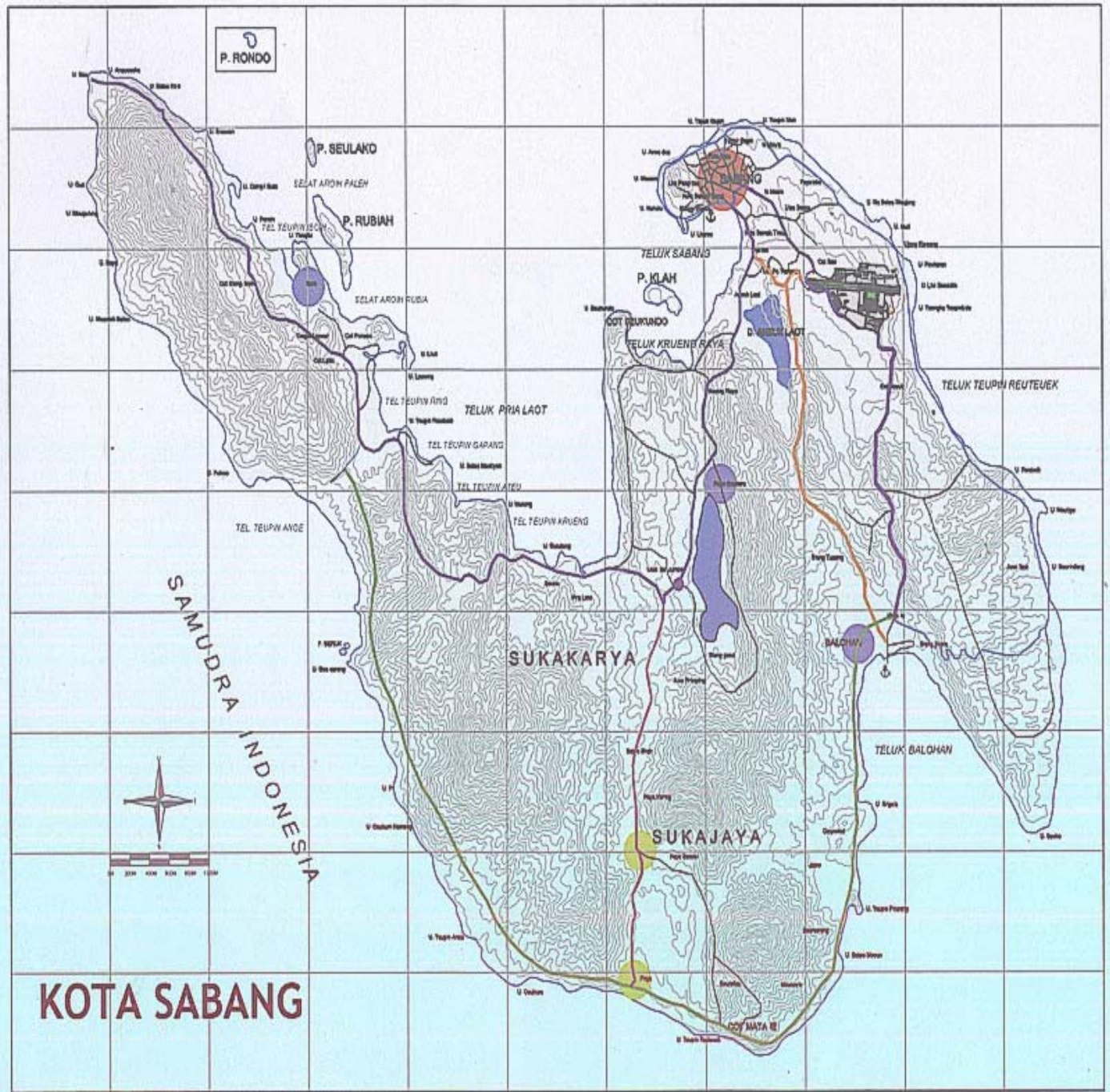
DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| A. Latar Belakang | I-1 |
| B. Tujuan Penyusunan SLHD | I-4 |
| C. Kondisi Fisik Kota Sabang | I-4 |
| D. Visi dan Misi Kota Sabang | I-7 |
| E. Prosedur Penyusunan SLHD | I-8 |
| F. Sistematika Penyajian | I-10 |
| | |
| BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA | II-1 |
| A. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup | II-1 |
| B. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup | II-3 |
| C. Kebijakan Tata Ruang | II-6 |
| D. Peraturan dan Perundangan Tentang Penataan Ruang .. | II-8 |
| E. Penyusunan dan Pengendalian Tata Ruang | II-15 |
| F. Kependudukan | II-17 |
| G. Tingkat Pertumbuhan Penduduk | II-18 |
| H. Pendidikan | II-20 |
| I. Ketenagakerjaan | II-21 |
| J. Kesehatan | II-24 |
| K. Tenaga Kesehatan | II-25 |
| L. Sarana Kesehatan | II-26 |
| M. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | II-26 |
| N. Pariwisata | II-27 |
| O. Transportasi | II-30 |
| | |
| BAB III AIR | III-1 |
| | |
| BAB IV UDARA | IV-1 |
| | |
| BAB V LAHAN DAN HUTAN | V-1 |
| | |
| BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI | VI-1 |
| | |
| BAB VII PESISIR DAN LAUT | VII-1 |
| | |
| BAB VIII AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | VIII-1 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| | |
| LAMPIRAN GAMBAR | |

DAFTAR GAMBAR

| | | Halaman |
|---------------|--|---------|
| GAMBAR I-1 | Kota Sabang Darai Atas | I-2 |
| GAMBAR I-2 | Kondisi Fisik Kota Sabang | I-5 |
| GAMBAR II-1 | Salah Satu Lokasi Pemanfaatan Lahan | II-1 |
| GAMBAR II-2 | Tugu Kota Sabang | II-6 |
| GAMBAR II-3 | Salah Satu Sudut Kota Sabang | II-9 |
| GAMBAR II-4 | Salah Satu Sudut Kota Sabang | II-12 |
| GAMBAR II-5 | Para Turis Sedang Menikmati Keindahan Gapang ... | II-27 |
| GAMBAR III-1 | Danau Aneuk Laot Dari Arah Timur | III-1 |
| GAMBAR III-2 | Air Terjun Pria Laot | III-2 |
| GAMBAR III-3 | Sumber Air Teupin Reuteuk | III-2 |
| GAMBAR IV-1 | Kondisi Udara di Wilayah Kota Sabang | IV-1 |
| GAMBAR V-1 | Pembukaan Lahan Untuk Pembangunan Perumahan Pengungsian | V-1 |
| GAMBAR VI-1 | Ekosistem Lingkungan | V-1 |
| GAMBAR VII-1 | Salah Satu Wilayah Pesisir di Kota Sabang | VII-1 |
| GAMBAR VII-2 | Keindahan Terumbu Karang | VII-4 |
| GAMBAR VII-3 | Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Kota Sabang | VII-5 |
| GAMBAR VIII-1 | Dinding Tebing Yang Harus Di Dam | VIII-4 |

PETA TOPOGRAPHY KOTA SABANG



Letak Geografis Kota Sabang :
05° – 46' – 28" s.d 05° – 54' – 28" LU
95° – 13' – 02" s.d 95° – 22' – 36" BT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Sabang terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling barat Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Kota Sabang meliputi beberapa pulau-pulau kecil yaitu Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo dengan Luas 456 Km², Luas Kota Sabang 153 Km² secara geografis terletak pada posisi 05^o, 46', 28", sampai dengan 05^o, 54', 28" Lintang Utara dan 95^o, 13', 02" sampai dengan 95^o, 22', 38" Bujur Timur, termasuk ekosistem darat dan ekosistem perairan.

Disamping itu masih terdapat potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat dikembangkan yang sangat beragam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non hayati antara lain hutan lindung, hutan yang dilindungi, hutan wisata taman laut, sumber panas bumi serta wisata bahari. Dalam satu dasawarsa Kota Sabang ini mulai berkiprah untuk bisa duduk sejajar dalam membangun dan memahami sumber daya alam yang ada didaerahnya hal ini untuk menciptakan keunggulan yang dimiliki dan menghasilkan pendekatan-pendekatan baru dalam konsep pengembangan wilayah perdagangan bebas yang menjadi state of the art pada penciptaan sektor andalan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, upaya ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam membangun daerah dengan meningkatkan aksestibilitas daerah terhadap penciptaan dan peningkatan fungsi teknologi, gagasan mengenai konsep teknologi based regional development muncul sejak adanya pergesaran paradigma dalam mengembangkan suatu sumber keunggulan komperatif menuju kepada konsep pengembangan daerah yang mengarah pada penciptaan keunggulan, yang merupakan salah satu fenomena yang akan menjadi ciri utama dinamika pembangunan yang menggunakan jasa lingkungan hidup.

Paradigma bagi pembangunan di Kota Sabang perlu diarahkan kepada pembentukan keunggulan yang dimiliki dengan menggali dan menerapkan sumber daya terutama dalam memasuki era otonomi daerah, akan tetapi dalam pengembangan pembangunan daerah diketahui ada beberapa kendala yang berkaitan dengan pemantapan dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungannya seperti sering terjadi kerusakan akibat bencana alam yaitu :

1. Terjadinya kerusakan lingkungan pembangunan kota disekitar Danau Aneuk Laot, limbah domestik dan limbah rumah tangga pada setiap tahun dan meningkatnya sedimentasi dan menambah keasaman air serta mengurangi kadar oksigen akibat kolodial pada gilirannya menimbulkan kerusakan pada standar baku mutu kualitas air danau. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan di kota Sabang adalah akibat gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004 yaitu dengan rusaknya lingkungan dan terjadinya debit danau aneuk laot secara drastis akibat semakin membesarnya rekahan didasar danau (Tim BPPT Danau Aneuk Laot, 2005).
2. Kerusakan yang disebabkan oleh erosi permukaan tebing danau serta longsor pada lokasi elevasi jalan tembus menuju Balohan Kecamatan Sukajaya.
3. Kerusakan akibat abrasi air laut pada saat kondisi iklim musim barat yang mencapai gletser arus laut dan tinggi gelombang mencapai 4 m yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pesisir pantai.
4. Kerusakan akibat degradasi tebing yang merupakan ancaman erosi tanah, kerusakan ini terutama terjadi pada musim hujan dengan kemiringan yang sangat curam yang sering didapat pada lahan kritis dan pertanian serta bukit yang memiliki tanah.
5. Pencemaran lingkungan yang disebabkan karena pembuangan limbah padat ke TPA yang terletak diluar kota dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila TPA tidak dilakukan pengelolaan dengan baik.
6. Pencemaran air danau aneuk laot yang disebabkan karena pembuangan limbah organik oleh perbengkelan serta deterjen limbah rumah tangga yang akan mempengaruhi baku mutu kualitas air.



Gambar. I-1. Kota Sabang dari Atas

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa masalah dan kendala diatas maka mendorong Pemerintah Daerah melalui Bapedalda Kota Sabang untuk melakukan penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah agar secara dini

dapat diketahui tentang penyebab dan cara mengatasi permasalahan kerusakan tersebut. Dengan demikian diatur strategi yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Sabang.

Secara umum masalah lingkungan di Kota Sabang dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) permasalahan pokok yang menonjol yaitu :

1. Meningkatnya kasus kerusakan pantai dan terumbu karang baik oleh abrasi, akibat tsunami yang telah merusak hampir semua ekosistem mangrove dan terumbu karang yang ada di daerah pesisir kota sabang seperti di gapang, iboih, pantai kasih, anoi itam juga aktifitas eksploitasi sumber daya alam laut yang merusak lingkungan.
2. Meningkatnya penambangan liar pada daerah-daerah tertentu, terutama daerah bukit berpasir yang sampai saat ini belum ditangani dengan baik.
3. Meluasnya kerusakan hutan lindung dan bertambahnya lahan kritis.
4. Meningkatnya pemotongan tebing tanpa memperhatikan kaidah lingkungan batas sarana transportasi dan pembuatan jalan lingkar kawasan Sabang.
5. Masih lemahnya sebagian pengertian para eksekutif dan legaslatif terhadap sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang belum sempurna, serta masyarakat terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Disamping hal tersebut diatas, masalah lingkungan dapat juga diakibatkan oleh konsep perencanaan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak benar yaitu :

1. Orientasinya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan prinsip keadilan sosial.
2. Lebih mementingkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan kepentingan generasi mendatang.
3. Penyeragaman pola pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengindahkan kenyataan tentang keberagaman budaya.
4. Kurangnya koordinasi antar sektor (ego sektoral lebih dominan) dan data ruang belum merupakan aturan yang mengikat.

Masalah lain yang dihadapi adalah pola pemanfaatan sumber daya alam yang kurang memberikan akses pada masyarakat sedangkan dipihak lain cenderung sentralistik dan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat adat dan lokal serta lemahnya kontrol masyarakat dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup selain itu peran serta aktif masyarakat dalam akses dan kontrol sumber daya alam belum optimal karena adanya lempar tangan pihak lain, hak –hak publik dan hak adat belum dilindungi.

Rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan di kota sabang adalah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, mengacu pola dasar pembanguna daerah sejak tahun 2001 dokumen perencanaan tersebut dilengkapi dengan neraca kualitas lingkungan hidup secara utuh menggambarkan kondisi dan permasalahan kependudukan dari lingkungan hidup serta upaya pengelolaan lingkungan dan faktor kependudukan, untuk mencapai maksud tersebut pemerintah kota sabang berupaya menata kegiatan penyusunan lingkungan seoptimal mungkin agar data yang diolah dapat menjadi infomasi dari hasil evaluasi ini mampu menggambarkan Status LingkunganHidup di kota sabang.

B. TUJUAN PENYUSUNAN SLHD

Penyusunan SLHD bertujuan untuk :

1. Menyediakan fondasi yang andal untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup di kota sabang.
2. Meningkatkan kesadaran dan pengertian terhadap kecenderungan dan kondisi lingkungan hidup baik ditingkat pemerintah maupun lapisan masyarakat.
3. Menjadi laporan utama tentang pengembangan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

C. KONDISI FISIK KOTA SABANG

a. Topografi dan Geomorfologi

- a. Didominasi oleh permukaan yang berelief perbukitan sampai dengan pegunungan.
- b. Pantai umumnya pantai yang berupa pantai yang tinggi dan curam dengan laut secara alami cukup dalam.
- c. Elevasi rata-rata daerah ini \pm 28 meter diatas permukaan laut.
- d. Kondisi topografi kawasan ini dapat dirinci sebagai berikut : 3 % daratan rendah, 10 % daratan bergelombang, 35 % perbukitan dan 52 % pegunungan.

b. Kondisi Geologi

- a. Terdiri dari batuan tufa andesit, yang terbentuk dari endapan alluvial (recent deposit) sebesar 3 %. Batuan tufa andesit ini terdiri atas 27 % batuan sediment dan 70 % batuan vulkanis.
- b. Secara umum sifat batuan tersebut relatif tidak stabil sehingga daya dukungnya terhadap tekanan relatif rendah, bahkan cenderung terjadi

perubahan pada struktur lapisan tanah, yang terutama terdapat pada kawasan Balohan dan Kota Bawah Timur.

- c. Komposisi tanah meliputi jenis latosol coklat, latosol coklat kemerahan dan latosol merah dengan laterit air tanah yang dominan dan hampir merata di seluruh wilayah.
- d. Sifat tekstur tanah terdiri dari jenis lempung, liat berpasir, sampah berpasir sesuai dengan bahan induk tanah.

c. Kondisi Klimotologi

- a. Sabang beriklim tropis, musim kemarau berkisar antara bulan Maret dan bulan Agustus dan musim penghujan berkisar antara bulan September s/d Februari.
- b. Curah hujan rata-rata 41,3 mm s/d 327,5 mm tiap bulannya. Bulan Januari sampai Juli 41,3 mm s/d 271,4 mm, dan Agustus s/d Desember antara 81,1 mm s/d 327,5 mm.
- c. Suhu udara panas dengan suhu minimum 25,5° C dan maksimum 28° C, dengan suhu rata-rata harian 26,75° C.
- d. Kelembaban udara rata-rata 86,5 %, dengan variasi kelembaban antara 81 % sampai dengan 92 %.
- e. Kecepatan angin pada musim Barat mencapai angka 14 knot, yang terjadi pada Bulan Mei sampai Oktober, sedangkan November s/d April anginnya dari arah Timur dengan kecepatan rata-rata 10 knot.



Gambar I-2 Kondisi Fisk Kota Sabang

d. Kondisi Demografi

- a. Pada tahun 2005 penduduk sebanyak 28.597 jiwa, dengan 14.663 jiwa penduduk laki-laki dan 13.934 jiwa penduduk wanita. Angka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 187 jiwa/km².
- b. Komposisi penduduk yang tergolong usia produktif (15 s/d 60 tahun) yaitu sebesar 65,31 %.
- c. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah di sektor perikanan sebesar 19,3 %, sektor pertanian sebesar 16,9 %, dan pegawai pemerintah sebesar 15,2 % sedangkan sisanya adalah dibidang lain seperti jasa perdagangan dll.
- d. Mayoritas penduduk Kota Sabang beragama Islam.

e. Pola Penggunaan Lahan

- a. Lahan didominasi kawasan hutan yaitu seluas 8.218,90 ha atau 54,79 %.
- b. Pemanfaatan lainnya adalah daerah perkebunan seluas 880,00 ha (5,87 %).
- c. Kawasan pemukiman hanya menempati areal seluas 901,00 ha atau 6,01 %.

a. Kondisi Perekonomian

- a. Dipengaruhi oleh sektor Pertanian, khususnya sub sektor perikanan dan perkebunan.
- b. Sektor lainnya hanya menyumbang sebesar 6,24 % dari keseluruhan pendapatan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

g. Kondisi Hidro-Oceanografi

1. Pasang Surut

- a. Permukaan air laut tertinggi adalah \pm 2,8 meter LWS (Lowest Water Spring) dan terendah adalah 1 meter LWS.
- b. Jenis pasang surut yang terjadi adalah semi diurnal tides, dengan beda pasang surut terjadi 1,8 meter.
- c. Pasang surut semi diurnal tides merupakan periode pasang surut sebanyak 2 kali dalam satu hari, dengan ketinggian pasang yang hampir sama.

2. Gelombang

- a. Gelombang yang terjadi relatif normal, dengan gelombang tertinggi 0,5 meter dan terendah 0,15 meter, dengan periode 4 s/d 6 detik.
- b. Arah datang gelombang yang dominan adalah dari arah barat dan Utara.

3. Arus

- a. Arus di Pelabuhan Sabang mempunyai karakter dengan pola harian, yang merupakan pengaruh dari pasang surut.
- b. Kecepatan arus pasang surut mencapai maksimum pada saat permukaan laut berada pada posisi duduk tengah (mean sea level) dan melemah sewaktu mendekati pasang tertinggi atau surut terendah.
- c. Pergerakan arus yang terjadi yaitu dari arah Utara, dengan kecepatan berkisar pada 0,03 s/d 0,08 m/dtk pada pasang perbani, dan 0,05 s/d 0,55 m/dtk pada saat pasang purnama.

D. VISI DAN MISI KOTA SABANG

a. VISI

- i. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, AMAN DAN BERTAQWA KEPADA ALLAH SWT, MELALUI PEMERINTAHAN BERSIH DAN BERWIBAWA.

b. MISI

- i. MEWUJUDKAN PENGALAMAN AGAMA ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
- ii. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
- iii. MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN SPIRITUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAREAH YANG BERFUNGSI MELAYANI MASYARAKAT, PRODUKTIF DAN BEBAS KKN.
- iv. MENINGKATKAN SUPREMASI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA YANG BERLANDASKAN KEADILAN DAN KEBENARAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL.
- v. MENETAPKAN PEREKONOMIAN KOTA SABANG PADA POSISI YANG KOMPETITIF DALAM ERA GLOBALISASI SEBAGAI PERWUJUDAN DARI KAWASAN PELABUHAN BEBAS DAN PERDAGANGAN BEBAS SABANG.

- vi. PERWUJUDAN OTONOMI DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT.

D. PROSEDUR PENYUSUNAN SLHD

Sumber data:

Data informasi yang digunakan untuk penyusunan laproan SLHD tahun 2007 ini adalah seperangkat data yang dikumpulkan dari instansi yang ada dilingkungan Pemerintah kota sabang dengan data yang bersumber dari industri perusahaan besar dan kecil apaun yagn bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan yang ada dalam wilayah kota sabang.

Dalam penyusunan SLHD tahun 2007 dilakukan pendekatan agar didapatkan suatu koordinasi dengan berbagai pihak dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Fungsional yaitu memperhatikan adanya kaitan dan keterpaduan antar satu instansi dengan instansi lainnya yang menangani urusan yagn menjadi kewenangan permintah kota sabang.
2. formal yaitu penerapan petunjuk penulisan yang telah diberikan dari tingkat provinsi yang disesuaikan dengna kondisi keadaan daerah.
3. struktural melakukan koordinasi dengan instans yang terkait dalam pemantauan dan penyediaan data yang diperlukan dalam SLHD.
4. Meterial yaitu pemanfaatan data yang tersedia disemuan instansi yagn terkait dalam penyususnan SLHD.
5. Operasional yaitu keterjpaduan dalam pelaksanaan penyusunan SLHD baik dalam pengumpulan data maupun dalam penulisan laporan.

a. Proses Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyusnan buku SLHD Tahun 2007 dikoordinasikan oleh Badan Pengendalian dampak lingkungan daerah (BAPEDALDA) Kota Sabang. Pekerjaan pelaksanaan penyusunan buku SLHD dimulai dengan melakukan rapat koordinasi dari semua angotan yang telah ditunjuk sebagai tim pelaksana penyusun sesuai dengan surat keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerah selaku ketua tim pembina penyusunan buku SLHD Kota sabang tanhun 2007.

b. Tahap Pengumpulan Data dan Analisis Data

Tahanpan pengumpulan data dilakukan terhadap semua aspek kependudukan dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tim pencari dan pengumpul data dari

tim pelaksana. Pengumpulan data di lingkungan instansi mengacu pada pedoman penyusunan data yang telah dibakukan. Data yang terkumpul dari perusahaan-perusahaan industri dan lain-lain kemudian digunakan sebagai data dasar yang kemudian diolah agar sesuai tabel yang terdapat dalam buku SLHD.

Analisis dan evaluasi berdasarkan data dan fakta dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk menggambarkan lingkungan hidup Kota Sabang dalam alur rangkaian informasi dari tiga sudut pandang yang meliputi :

1. Penyebab atau Tekanan (Pressure)

Penyebab atau tekanan terhadap lingkungan yang berupa kegiatan manusia yang dapat menimbulkan tekanan dan kerusakan lingkungan seperti kegiatan industri, pertanian, pertambangan dan peternakan, kesehatan, perdagangan dan perhubungan dan lain-lain.

2. Kondisi atau Status (State)

Kondisi lingkungan baik alam, buatan, maupun sosial beserta isi-isu lingkungan yang berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan, serta dampak (impact) yang terjadi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3. Langkah-langkah Penanggulangan (Response)

Kegiatan untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah dilakukan pemerintah dan segenap lapisan masyarakat, termasuk keberhasilan dan kegagalan yang dialami, kendala dan hambatan restorasi atau pemulihan lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kebijakan tersebut disusun rekomendasi berupa kebijakan atau program kegiatan untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup yang belum berhasil atau terselesaikan dalam satu tahun ke depan.

c. Tahap Penulisan

Pada tahap ini dimulai dengan penyusunan data dan yang telah didapatkan dari berbagai sumber yang dituliskan ke dalam buku SLHD tahun 2007, (demografi, Sosial Ekonomi, sumber pencemaran, sumber daya alam dan analisis kebijaksanaan). Kemudian rapat-rapat koordinasi secara berkala dilakukan guna merumuskan strategi penyusunan buku agar penulisan sesuai dengan panduan umum secara nasional dan penyajiannya harus tepat waktu.

d. Tahap Penyerahan Laporan

Pembahasan draft laporan dan perbaikan laporan dilakukan pada bulan terakhir dari penyusunan. Penyampaian laporan kepada KNLH Jakarta, PPLH Regional, Bapedalda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Walikota Sabang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan buku SLHD mengikuti pedoman nasional disajikan dengan penjelasan dari Status Lingkungan Hidup dan Rona Lingkungan.

Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah.

Buku SLHD merupakan status lingkungan hidup tentang demografi, demografi sosial, sosial ekonomi, sumber pencemaran dan sumber daya alam serta merupakan pengukuran dan evaluasi yang mendukung analisis dampak lingkungan. Data yang ada tersebut disusun menurut urutan dan cara pendataan seperti dalam pedoman penyusunan data. Oleh karena tidak semua tabel yang ada pada pedoman dapat diisi masih ada kekurangan maka data tabel tersebut tidak dicantumkan. Akan tetapi bila ditemukan data akan ditetapkan yang dikehendaki dalam pedoman maka dipertimbangkan juga untuk dimasukkan agar dapat memberikan penjelasan yang ada di kota sabang seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa data yang diperoleh adalah dari beberapa instansi terkait dan perusahaan yang ada di kota sabang.

Outline buku SLHD dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- Tujuan Penulisan laporan,
- Visi dan Misi Kota Sabang,
- Gambaran umum
 - Kondisi geografis, demografis, geologi, tataruang, kependudukan dan kesehatan masyarakat.
 - Kebijakan pendanaan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya di daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

- Bab II : ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA**
(Penjelasan isu lingkungan hidup utama dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan kemasyarakatan dengan menggunakan analisis S-P-R).
- Bab III : AIR**
(Membahas kondisi, penyebab, dampak dan respon permasalahan pada media air)
- Bab IV : UDARA**
(Membahas kondisi, penyebab, dampak dan respon permasalahan pada media udara)
- Bab V : LAHAN DAN HUTAN**
(Membahas kondisi, penyebab, dampak dan respon permasalahan pada media lahan dan hutan)
- Bab VI : KEANEKARAGAMAN HAYATI**
(Membahas kondisi, penyebab, dampak dan respon permasalahan pada media keanekaragaman hayati)
- Bab VII : PESISIR DAN LAUT (bila ada)**
(Membahas kondisi, penyebab, dampak dan respon permasalahan yang terjadi pada media pesisir dan laut)
- Bab VIII : AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
Berisi tindak lanjut dari respon yang sudah dilaksanakan maupun yang direncanakan.

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan dan azas manfaat, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan hidupnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pengembangan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyerasikan aktifitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menjadi dasar acuan untuk kegiatan pembangunan sektor lainnya agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup sehingga kelanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumber daya alam diupayakan untuk dapat memberikan akses dan peran aktif kepada masyarakat termasuk adat dan lokal. Hukum adat di Kota Sabang yang mengatur tentang pengelolaan Sumber Daya Alam



Gambar II-1. Salah Satu Lokasi Pemanfaatan Lahan

dan lingkungan harus menjadi salah satu dasar dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga masyarakat daerah dapat menjaga dan memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup menurut hukum adat yang telah ada disamping peraturan perundangan yang ada.

Keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan sebagai komitmen terhadap pembangunan lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan diperlukan langkah-langkah penanganan terpadu disegala bidang sehingga dalam pengelolannya diperlukan sinergi dan keterpaduan langkah. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang mampu mengantisipasi permasalahan lingkungan di Kota Sabang antara lain :

1. Pemanfaatan SDA yang efektif dan efisien, perlu memperhatikan : aspek tata ruang, ekosistem, kelestarian, pengolahan dan manfaat, kemakmuran rakyat berkelanjutan, tanggung jawab dan aspek norma hukum.
2. Mengelola dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
3. Mendayagunakan SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan penghematan penggunaan SDA melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.
4. Melakukan pemlihan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup dengan kegiatan konservasi, reboisasi dan rehabilitasi dan transplantasi terumbu karang.
5. penerapan AMDAL, UKL/UPL ditingkatkan melalui peran serta masyarakat dan instansi terkait dalam pemberlakuan kekuatan hukum.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan mengembangkan mekanisme pengawasan oleh masyarakat luas (DPRD, Pers, LSM, Ilmuwan, Pengusaha, dll).
7. Melaksanakan konservasi dan pengelolaan Kawasan Taman Laut, Hutan Lindung, Hutan Wisata, Hutan Mangrove, Sumber Daya Air Danau Aneuk Laot, Danau Paya Semaseh, Waduk Paya Seunara untuk melindungi keanekaragaman hayati dan kekayaan plasma nutfah daerah.
8. Menerapkan kebijakan-kebijakan melalui indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.
9. Membangun perekonomian yang berlandaskan sumber daya yang ada didaerah dan semaksimal mungkin menggali potensi yang sudah ada dalam masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
10. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga BAPEDALDA dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

11. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembanggaan perlu mendapat dukungan yang proporsional.

B. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara efektif dan efisien maka program pengelolaan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan di Kota Sabang di susun dalam 4 (empat) Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagai berikut :

a. Program Pengembanban dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai inventarisasi dan evaluasi. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah tersedianya data dan teraksesnya informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) Penyusunan Renstra, DAS dan LK; (2) Penyusunan Laporan Inventarisasi / Evaluai Program Lingkungan Hidup Lintas Sektoral; (3) Penyusunan LAKIP, Laporan Bulanan dan Tahunan Proyek; (4) Pembuatan Peta Kawasan Rawan Dampak; (5) Penyusunan Buku SLHD 2007; (6) Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam dan (7) Pengembangan Informasi Lingkungan.

b. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air, udara, Ekosistem Perairan dan Ekositem Darat. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah : (1) Termanfaatkannya Sumber Daya Alam untuk mendukung kebutuhan baku lingkungan secara efisien dan berkelanjutan; (2) Terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tidak terkendali dan eksplitatif.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang; (2) Sosialisasi Perizinan Pembuangan Limbah; (3) Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Proyek yang berdampak terhadap Lingkungan; (4) Penyuluhan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat/Dunia usaha; (5) Pengawasan dan

Monitoring Kawasan Lindung/Pantai/Terumbu Karang, Hutan Wisata, Mangrove, Hutan Pantai, Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau.

c. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program yang hendak diwujudkan adalah terciptanya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah : (1) Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah, Air Tanah, Udara dan Kebisingan; (2) Pengawasan dan Pengendalian Danau, Laut dan Pesisir Pantai; (3) Peningkatan dan Mutu / Kualitas Danau Aneuk Laot (Prokasih); (4) Pengawasan / Penerapan Baku Mutu Lingkungan Kota Sabang.

d. Program Penataan Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, mengembangkan kelembagaan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan hidup, yang efektif dan berkeadilan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya kelembagaan bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Kegiatan pokok program ini adalah : (1) Peningkatan Kelembagaan Lingkungan Hidup; (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup; (3) Pengawasan Teknis AMDAL, UKL/UPL; (4) Pengkajian AMDAL; (5) Pengembangan Laboratorium; (6) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat/Kelompok Pelestarian Lingkungan dalam Kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Mangrove; (7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air dan Sarana Pengelolaan Sampah.

Strategi Kebijakan yang Ditempuh

Pokok-pokok Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup arahan GBHN 1999 – 2004 dan arahan Agenda 21 Nasional adalah :

1. Mengelola Sumber Daya Alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.
4. Mendelegasikan secara bertahap wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan Undang-undang.
5. Mendayagunakan Sumber Daya Alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

Strategi pengelolaan lingkungan hidup Kota Sabang yang akan ditempuh dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama antar sektor dan instansi terkait perlu dibina melalui sistem yang lebih efektif.
2. Dalam pengelolaan SDA mengikuti rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
3. Mengembangkan peran serta masyarakat melalui pranata dan kelembagaan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dan permasalahan lingkungan global.
4. Pengendalian pencemaran diupayakan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan.
5. Mendorong setiap Stake Holder untuk menggunakan dokumen AMDAL, UKL/UPL sebagai pegangan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam.
6. Mendorong semua Stake Holder untuk mematuhi peraturan-peraturan / perundang–undangan lingkungan hidup yang berlaku.
7. Menyediakan peralatan dan Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan laboratorium yang representatif.
8. Percepatan implementasi Komisi AMDALDA Kota Sabang, yaitu memberi kesempatan yang luas untuk mengelola Sumber Daya Alam daya guna meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu didorong tersedianya perangkat hukum dalam bentuk Qanun Pengelolaan Sumber Daya

Alam, sekaligus menjadi payung bagi Qanun Pemanfaatan Sumber Daya Alam dari sektor lain.

Dalam hal ini perlu memperhatikan :

- Pengelolaan Sumber Daya Alam terbaharukan seperti : flora, fauna, lahan, air dan udara harus dilestarikan secara bijaksana;
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tak terbaharukan seperti : Danau Aneuk Laot, Terumbu Karang, bahan galian golongan c, sumber panas bumi harus dilakukan secara hemat dan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan diikuti dengan upaya mencari alternatif pengganti, sehingga berkesinambungan kegiatan pembangunan dapat berlangsung;
- Pengembangan pengelolaan Sumber Daya Alam (hutan, tanah termasuk lahan tidur, air dan bahan tambang) dalam upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- Peningkatan kualitas lingkungan sosial ditekankan pada pengentasan kemiskinan, penyeimbangan kesenjangan sosial, dan peningkatan peran serta masyarakat.
- Terakomodasinya hak-hak masyarakat dan hak ulayat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

C. KEBIJAKAN TATA RUANG

Dengan lahirnya Undang-undang No 4 tahun 1992 tentang kebijakan tata ruang maka kita harus lebih bijaksana lagi dalam menentukan strategi dan arah kebijaksanaan pembangunan di Kota Sabang, karena misi pembangunan yang digariskan dalam misi kegiatan pembangunan daerah tidak dapat dianggap ringan, karena muatannya sangat stretegi dan menuntut semua pihak untuk sama-sama mengisi dan meraihnya dengan bekerja keras, karena tanpa itu rasanya sulit misi tersebut dapat dicapai.



Gambar II. 2. Tugu Kota Sabang

Dalam upaya kearah itu kita harus merumuskan langkah-langkah terobosan stretegis yang bijaksana, terarah, terkoordinasi dengan didasari kesamaan visi serta melakukan perencanaan holistic dalam penyusunan kebijaksanaan umum / khusus pembangunan daerah, maupun dalam penyusunan kebijaksanaan rencana tata ruang wilayah sebagai matra ruang / arahan lokasi kegiatan pembangunan daerah. Langkah selanjutnya kita harus menyiapkan diri dalam hal penegakan supremasi hukum / Law Enforcement, karena pada saat sekarang tanpa yang satu ini semua angan-angan misi pembangunan itu mustahil akan terwujud.

Kebijaksanaan (kebijakan) penataan ruang wilayah Provinsi merupakan dasar kebiaksanaan tata ruang Kota Sabang, sehingga posisinya cukup strategis walaupun kedalaman telaahan peta dan materi / substansinya masih umum. Akan tetapi dengan dasar kebijaksanaan yang kuat dan terarah dapat memberikan landasan kebijaksanaan spatial dalam merumuskan arah bagi daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Dalam upaya menjaga percepatan perkembangan pembangunan yang sesuai dengan rencana kita harus melembagakan suatu manajemen pengembangan wilayah yang bijaksana, efektif dan membumi (menyentuh akar rumput) dengan didasari kebijaksanaan action plan pengembangan daerah yang konprehensif. Semua itu harus dilakukan untuk menghadapi kenyataan bahwa dengan pertumbuhan penerimaan dana khusus perimbangan daerah pasca pemberlakuan Otonomi Khusus, jangan sampai kesenjangan taraf kehidupan masyarakat yang selama ini dirasakan sangat signifikan di kota sabang tetap berlangsung.

Filosofi perencanaan wilayah menganjurkan integrasi perencanaan sosial ekonomi dan Sumber Daya Alam yang merupakan paradigma perencanaan konprehensif. Konsep ini mempunyai pandangan jauh ke depan, mengantisipasi arah perkembangan daerah, kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana wilayah serta keinginan masyarakat yang diarahkan untuk mengimplementasikan bentuk pengembangan tata ruang wilayah yang diinginkan. Lebih jauh lagi konsep kebijaksanaan tadi harus memberikan pedoman penting dalam menyusun rencana-rencana khusus yang sifatnya mendesak (action plan) disamping rencana pengalokasian dananya untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Perencanaan konprehensif atau holistic ini mencakup penyusunan serangkaian telaah yang sangat khusus sampai ke telaah intensif tentang rencana pembangunan. bagi seluruh wilayah. Disamping itu kebijaksanaan perencanaan holistic ini harus pula mencakup pengkajian atas struktur fisik suatu wilayah perencanaan, pengukuran kecenderungan perkembangan, penentuan sasaran dan tujuan pertumbuhan dan perkembangan wilayah di masa depan berikut usulan dalam hal meningkatkan derajat

keseimbangan lingkungan hidup (untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan / sustainable development) dll, dilengkapi juga dengan usulan kebijakan yang mengendalikan rencana tersebut dan merumuskan beberapa peraturan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Selanjutnya agar konsep ini terlaksana pada prosesnya harus berorientasi kepada kebutuhan stakeholder sehingga mendapat dukungan dari wakil-wakil rakyat kota pada saat usulan-usulan pelaksanaan rencana tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah. Lebih jauh dari itu dalam mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan yang sifatnya makro, pada kebijaksanaan pengembangannya diperlukan arahan strategis kebijaksanaan ekonomi regional / global guna mengantisipasi kondisi dunia semakin mengglobal dalam waktu dekat ini.

Untuk itu maka materi dan substansi penataan ruang Provinsi ini harus juga dapat mengakomodasi kemungkinan perkembangan lokal, regional dan global serta secara seksama dapat mengarahkan potensi perkembangan masing-masing Kabupaten / Kota dalam menempatkan peran dan fungsinya dalam bingkai sebagai kawasan-kawasan khusus pada wilayah regional dan global yang tentunya diarahkan agar nantinya memiliki keunggulan yang signifikan secara komparatif maupun kompetitif.

D. PERATURAN DAN PERUNDANGAN TENTANG PENATAAN RUANG

Dalam upaya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan tata ruang wilayah di Indonesia selama ini sudah banyak disusun rencana tata ruang wilayah dan kota dari mulai level Kecamatan, Kelurahan dan kawasan pedesaan, akan tetapi dalam kenyataannya sebagian besar rencana yang telah di susun dengan susah payah dan menelan biaya yang tidak sedikit itu tetap hanya tinggal rencana saja, tidak / kurang dilaksanakan secara konsekuen di lapangan.

Terdapat beberapa alasan / masalah dalam implemmentasi rencana tersebut, tapi yang paling menonjol adalah lemahnya kekuatan hukum yang mendukung penataan ruang. Sudah lebih dari 20 tahun konsep rancangan undang-undang penataan ruang diperdebatkan, akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1992 baru lahir UU No. 24 tentang Penataan Ruang (UU PR)

Jadi saat ini UU No. 24 tahun 1992 merupakan landasan konstitusional kegiatan penataan ruang, yang dapat berfungsi sebagai pedoman arahan lokasi pelaksanaan pembangunan di daerah yang juga merupakan suatu alat strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang permasalahannya semakin berkembang dan kompleks. Selanjutnya untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan ruang dengan berbagai dimensi dan konsekuensi dampak yang diakibatkannya, perlu

adanya suatu koordinasi yang terpadu antara pihak pemerintah dan masyarakat agar setiap proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan lebih berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.

1. Arah kebijaksanaan Tata Ruang Kota Sabang

Dalam Kebijakan Umum Program Pembangunan Kota Sabang sebagai kebijaksanaan umum yang berkaitan dengan penataan ruang adalah sebagai berikut :

Sasaran program yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya rencana tata ruang yang mantap, konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang.
- b. Meningkatnya kinerja lembaga pengelola penataan ruang.
- c. Terciptanya kapasitas hukum terhadap hak milik atas tanah.
- d. Terbinanya akses informasi tata ruang kepada masyarakat.
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat tata ruang.



Gambar. II.3. Salah Satu Sudut Kota Sabang

Kegiatan Pokok yang dicanangkan :

- a. Penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kawasan.
- b. Peningkatan sistem informasi pertanahan yang handal dan penegakan hukum pertanahan secara konsisten.
- c. Pengendalian penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Sinkronisasi koordinasi perencanaan pembangunan fisik dan prasarana.
- e. Merevisi rencana tata ruang yang sudah kadaluarsa atau yang tidak sesuai lagi dengan dinamika pertumbuhan atau dengan aturan/kaidah penataan ruang.
- f. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 2 (dua) Titik Kawasan Strategis dan sekitarnya, daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Balohan Sabang.

- g. Melaksanakan rencana program pengembangan kawasan andalan.
- h. Konsolidasi Tanah Perkotaan dan Pedesaan.
- i. Pengawasan, Pengendalian dan Penerbitan pemanfaatan tata ruang.
- j. Melaksanakan rencana strategis pesisir pantai dan laut lestari.
- k. Melaksanakan rencana Hutan Pantai dan Pengelolaan mangrove, rumput laut.

Kebijaksanaan RTRW

Kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Kota Sabang yang terakhir disusun pada tahun 2004 diantaranya adalah :

- a. Memelihara kelestarian dan keseimbangan daya dukung lingkungan alam dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, serta kelangsungan hidup generasi manusia dan makhluk hidup lainnya. (salah satu butir tujuan jangka panjang ke dua di Kota Sabang.
- b. Melanjutkan usaha pemerataan pembangunan antar sektor dan antar wilayah dalam rangka meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya (salah satu butir tujuan pembangunan lima tahun keenam daerah).
- c. Sebagai dasar Kebijakan pengembangan wilayah RTRW yang sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Kota Sabang, terbagi ke dalam tiga wilayah Pembangunan (WP) serta dua Zona Pengembangan, yaitu :

Wilayah Pembangunan meliputi:

- a. Wilayah Pembangunan I (WP-I) terdiri dari Kawasan wisata Gapang – Iboih.
- b. Wilayah Pembangunan II (WP-II) terdiri dari Kawasan Sabang.
- c. Wilayah Pembangunan III (WP-III) terdiri dari Kawasan Industri di Balohan dan Perikanan di Sabang.

Zona Pengembangan terdiri dari :

- a. Zona Industri meliputi seluruh daerah di Kawasan Kecamatan Sukajaya Sabang yakni meliputi : Kota Sabang, Kecamatan Sukakarya Sabang.
- b. Zona Pertanian meliputi seluruh daerah di Kawasan Kelurahan Balohan, Kelurahan Cot Abeuk, Kelurahan Paya Seunara, Kelurahan Bate Shok, Paya Keunekai, Jaboi dan Kelurahan Keunekai.

Kebijaksanaan RTRW Kota Sabang yang berkaitan dengan penataan ruang Kawasan Perkotaan mempunyai muatan materi sebagai berikut.

a. Arahan pengelolaan Kawasan Lindung dan Budi daya.

Setelah dilakukan upaya Sinkronisasi RTRW dengan RTRWK dan berpodaman kepada Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta studi lainnya, maka pada revisi RTRW tahun 2003 ditetapkan luas kawasan lindung adalah 3.400 ha atau sekitar 46,29 % dari luar wilayah Kota Sabang, sedangkan kawasan budi daya seluas 4.570,30 ha atau sekitar 30,47 % dari luas wilayah Kota Sabang.

Kawasan Lindung dikelompokkan kedalam 4 (empat) golongan :

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan wisata dan kawasan pesisir pantai.
- Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari : kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau / waduk / rawa, dan kawasan sekitar mata air.
- Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya terdiri dari : cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, daerah pengungsian satwa, pantai berhutan bakau dan Taman Nasional (TNGL).
- Kawasan Rawan Bencana Alam.

b. Arahan Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Kawasan Pedesaan dan Kawasan Tertentu.

Penyelenggaraan penataan ruang kawasan perkotaan diarahkan untuk :

- Mengatur ruang kawasan perkotaan guna mencegah dampak negative terhadap keseimbangan lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial.
- Meningkatkan kawasan perkotaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat.
- Mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan guna mencapai kehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan lingkungan berkeadilan serta menjunjung kelestarian nilai-nilai budaya. Kawasan-kawasan perkotaan yang dialokasikan dengan perencanaan yang jelas dan berkesinambungan.

c. Arahkan Kawasan Pemukiman Perkotaan

Pengembangan kawasan pemukiman terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam dan khusus pemukiman di kota-kota besar diarahkan peningkatan prasarana dan sarana perkotaan. Pengembangan pemukiman baru diarahkan lokasinya tidak pada lahan sawah, danau, waduk, pesisir pantai, daerah genangan tangkapan air atau rawa dan jauh dari kawasan rawan dampak sedangkan arahan pengembangan pemukiman diluar kota seyogyanya lokasinya pada sentra-sentra produksi pertanian dan pengembangan kawasan pemukiman sepanjang jalur pantai Timur, Utara, Barat dan Selatan dalam wilayah Kota Sabang.

d. Arahkan Pengembangan Sistem Pusat Pemukiman Perkotaan.

- Pusat-pusat pemukiman perkotaan diupayakan agar terbentuk suatu sistem yang dapat mencerminkan peran dan fungsi serta hirarki pusat sesuai dengan wilayah pelayanannya dan dapat mencerminkan pola keterkaitan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tersebut.
- Pengembangan sistem pusat perkotaan diarahkan agar dengan penyebaran pusat-pusat tersebut dapat memberikan peran dan fungsi hirarki pelayanan bagi wilayah hinterlandnya dengan tetap menciptakan keterkaitan yang saling bersinergi dalam hal pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
- Direncanakan pada akhir tahun perencanaan (2015) telah tercipta satu lagi Kota Baru yaitu Kota Anoi Itam dan Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya.



Gambar. II.4 Salah Satu Sudut Kota Sabang

e. Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas

Prioritas pengembangan bagi kawasan perkotaan adalah :

- Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Andalan, diantaranya Kawasan Balohan dan sekitarnya, Kawasan Gapang dan sekitarnya serta Kawasan Pantai Barat dan sekitarnya serta kawasan cepat berkembang lainnya.

Bentuk-bentuk Penyimpangan Tata Ruang

Beberapa penyebab penyimpangan Pembangunan Fisik dari RTRW. Seperti telah diketahui pada saat ini masih sering kali terjadi penyimpangan pembangunan fisik yang menempati ruang (daratan) dari RTRW baik tingkat telaahan. Mengapa hal itu sering terjadi, ternyata alasannya adalah sebagai berikut :

- Kelambahan materi/substansi RTRW yang disusun.
Hal ini sering kali terjadi terutama yang dialami di Kota Sabang, yaitu :
 - a. RTRW yang telah disusun dan ditetapkan belum mempertimbangkan aspek-aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang (development plan & action plan);
 - b. Materi dan substansi rencana tata ruang wilayah seperti yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang masih kurang atau malah tidak lengkap, padahal untuk penyusunan RTRW tersebut sudah ada Petunjuk/Pedoman Teknis Penyusunan dan Perhitungan Biayanya (diantaranya Kepmendagri No. 137 Tahun 1998);
 - ☞ Masih terbatasnya sumber daya manusia bidang tata ruang dilingkungan Pemda Kabupaten/Kota sehingga pihak Pemerintah Daerah tersebut kurang dapat mengontrol pada saat penyusunan RTRW oleh konsultan perencanaan dan atau menterjemahkan isi RTRW;
 - ☞ Masih terbatasnya konsultan profesional dan berpengalaman dibidang perencanaan tata ruang wilayah Kota Sabang keadaannya diperparah dengan kurang kondusifnya keamanan sehingga Planner yang berkualitas enggan datang ke daerah ini.
- Kelambahan Sosialisasi dan Kelembagaan
 - a. Walaupun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan dan Permendagri No. 9 Tahun 1998

tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan tata Ruang di Daerah, pada pelaksanaannya Pemerintah Daerah masih terbatas sekali melakukan kegiatan ini bersama masyarakat.

- b. Kinerja dan peran lembaga bidang tata ruang saat ini masih dirasakan belum optimal dalam menangani masalah tata ruang wilayah/kota. Termasuk dalam hal ini Tim Kelembagaan seperti TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Sabang belum kelihatan hasil kerjanya.
- c. Dalam implementasikan pemanfaatan ruang dilapangan, para pelaku pembangunan (pihak pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun/ditetapkan.
- Kelemahan Pengawasan/Pengendalian dan Penegakan Law Enforcement.
Dalam hal kelemahan dibidang penegakan supremasi hukum ini memberikan kontribusi yang paling berpengaruh atas ketidakserasian dan penyimpangan rencana tata ruang wilayah dan kota selama ini, karena baik subjek maupun objek pelaku penggunaan ruang merasa bahwa pelanggaran dibidang ini rasanya belum pernah atau sangat jarang mendapat sanksi hukum. Disamping masih lemahnya mekanisme pengendalian pemanfaatan tata ruang di tiap level pemerintahan daerah.

Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pada umumnya bentuk pelanggaran atau penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan diklasifikasikan menurut skala ruang, diantaranya adalah sebagai berikut :

- **Pelanggaran Struktur Fungsi Ruang**

Jenis pelanggaran ini adalah pelanggaran/ penyimpangan penggunaan lahan fungsional dalam skala wilayah atau kawasan. Biasanya terjadi dalam jenis RTRW atau RTRWK dimana fungsi kawasan yang telah digariskan untuk kawasan lindung atau budidaya tertentu, ternyata digunakan oleh jenis penggunaan lain atau budidaya lainnya.

- **Pelanggaran Peruntukan**

Pelanggaran ini biasanya terjadi pada rencana tata ruang dalam skop telaahan yang lebih detail, seperti pada Rencana Rinci/Detail Tata Ruang Kawasan atau Rencana Detail Tata Ruang Kota, artinya blok peruntukan (zoning) untuk dominasi kegiatan tertentu dilanggar dan dipakai untuk kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan yang telah digariskan misalnya rencana blok peruntukan kawasan dominasi perumahan dan perkantoran (Kelurahan Kota Atas masih saja

diperbolehkan dibangun ruko-ruko atau blok peruntukan jalur hijau/kawasan lindung setempat yang seringkali dilanggar).

- **Pelanggaran Tapak Kawasan**

Jenis ini merupakan pelanggaran garis sempadan (pantai, danau, jalan dan bangunan) atau dapat juga pada kawasan pertanian yang beririgasi teknis yang garis batasnya dilanggar untuk kegiatan lain (umumnya perumahan). Disamping itu dalam Rencana Teknik Ruang Kota pelanggaran perpetakan kawasan terbangun atau pelanggaran penggunaan braangaang (batas pemisah antar blok bangunan)

- **Pelanggaran Persyaratan Teknis Bangunan**

Biasanya yang dilanggar adalah RTBL (Rencana Teknis Bangunan dan Lingkungan) dan PBS (Peraturan Bangunan Setempat) yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkotaan dan Pemukiman atau Dinas Tata Kota dan Pemukiman mengenai koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien dasar bangunan (KDB), persyaratan tinggi bangunan, arahan jenis konstruksi setempat atau arahan bentuk bangunan/arsitek umum setempat.

E. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG

Kegiatan penataan selanjutnya selain tahap penyusunan rencana dan pelaksanaan tata ruang adalah tahap pengawasan dan pengendalian (monitoring dan controlling)

1. Tujuan Pengendalian

Dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan dari pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk tercapainya konsisten pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung usaha-usaha pengendalian pemanfaatan ruang di daerah perlu adanya suatu pedoman/petunjuk atau prosedur manual yang baku untuk dipedomani oleh instansi terkait atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upayanya mengendalikan pemanfaatan ruang.

2. Dasar Hukum

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang (didalamnya termasuk kegiatan watching, monitoring dan controlling) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 dan 18 UU No. 24/1992.

Pasal 17

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 18

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- b. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perlunya Pengendalian

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu piranti manajemen pengelolaan pembangunan daerah yang sangat diperlukan oleh penentu kebijakan (decision maker) untuk menentukan bahwa pelaksanaan/pemanfaatan ruang telah berlangsung sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan ini maka dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyimpangan fungsi ruang tidak terkendali dan tidak terarah.

Akan tetapi pengendalian pemanfaatan ruang dapat berfungsi secara efektif bilamana didasari oleh :

- Produk rencana tata ruang yang valid dan berkualitas yang pada prosesnya merujuk pada pedoman teknis penyusunan rencana tata ruang dan ditangani oleh planner yang profesional dan berpengalaman, karena bila tidak maka akan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana yang diamanatkan.
- Sistem pengendalian yang diperkuat oleh kelengkapan (sistem) informasi yang akurat tentang adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan, dengan disertai ketegasan yang reaktif dan tepat dalam menangani penyimpangan tata ruang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk itu maka sebelumnya perlu dipahami dan dipersiapkan dengan tepat mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, baik yang terkait dengan piranti manajemen, perkuatan kelembagaan dan penataan mekanisme persyaratan dan perizinan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta/kalangan dunia usaha dan masyarakat terutama yang dilakukan di daerah Kabupaten/Kota.

F. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Penduduk

Selama masa pembangunan, data di Indonesia sudah cukup memadai untuk dapat menggambarkan struktur dan proses penduduk. Data itu antara lain dapat diperoleh dari hasil Sensus Penduduk (SP) dan survei-survei penduduk seperti Supas, Susenas, Sakernas, SDKI dll. Data penduduk ini mutlak dibutuhkan dalam perencanaan, landasan kebijaksanaan dan penilaian hasil pembangunan agar semua rangkaian kegiatan pembangunan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Masalah kependudukan memang merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan berkesinambungan. Salah satu masalah kependudukan adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk maka masalah yang ditimbulkannya pun akan semakin banyak. Hal ini tidak lain adalah dampak dari pembangunan yang sedang dilaksanakan guna meningkatkan taraf kehidupan penduduk itu sendiri. Dengan taraf kehidupan yang cukup, diharapkan kesempatan memperoleh pendidikan akan meningkat, sehingga sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia yang bermutu akan memperlancar pembangunan di masa datang.

Peningkatan jumlah penduduk menuntut adanya peningkatan penyediaan fasilitas-fasilitas kehidupan masyarakat. Selain fasilitas sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan pokok, juga tidak kalah pentingnya fasilitas pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan dan rekreasi. Dengan kecukupan fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan penduduk akan merasa aman, tentram dan nyaman untuk tinggal dalam suatu wilayah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan akan lebih mudah dan lancar. Jumlah penduduk Kota Sabang hasil Sensus Penduduk 2005 berjumlah 28.597 jiwa yang terdiri dari laki-laki 14.663 jiwa dan perempuan 13.934 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101. Sedangkan bila dibandingkan penduduk tahun 2005 terjadi penambahan sehingga total penduduk berjumlah 28.597 jiwa.

2. Komposisi Umur

Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin menjadi salah satu aspek penting dalam studi kependudukan, karena struktur umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik kependudukan yang mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu struktur umur dan jenis kelamin merupakan data pokok untuk mempelajari berbagai masalah kependudukan.

Struktur umur penduduk akan terlihat lebih sederhana jika kelompok umum lima tahunan dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu 0-14, 15-64 dan 65 ke

atas. Dari pengelompokan tersebut dapat dibedakan struktur umur penduduk menjadi tiga kategori yaitu struktur umur muda, umur peralihan dan umur tua. Dikatakan struktur umur muda jika persentase 0-14 tahun lebih besar atau sama dengan 40 % dan umur 65 ke atas kurang dari atau sama dengan 5 %. Sedangkan struktur umur tua jika persentase umur 0-14 tahun kurang atau sama dengan 30 % dan umur 65 ke atas lebih besar atau sama dengan 10 %. Persentase penduduk umur 0-14 tahun sebesar 37,3 % pada tahun 2005 dan turun pada tahun 2003 menjadi 36,7 %. Hal ini berarti terjadi pergeseran dari struktur umur muda pada tahun 2002 ke struktur umur peralihan pada tahun 2005.

Sementara itu struktur umur penduduk setiap Kabupaten/Kota umumnya mempunyai struktur umur peralihan. Untuk lebih rinci, penduduk menurut umur dapat di kelompokkan lebih jauh atas anak-anak (0-14), remaja (15-19), muda (20-39), Kota Sabang adanya peningkatan sebesar 5.60 ribu/jiwa. Tingginya persentase penduduk usia muda merupakan gambaran masih tingginya tingkat kelahiran di suatu daerah. Hal ini juga dapat turut berpengaruh terhadap rendahnya proporsi penduduk lansia walaupun dapat juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan.

3. Komposisi Jenis Kelamin

Memperlihatkan rasio jenis kelamin tahun 2004 dan tahun 2005. Pada tahun 2005 penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu dengan rasio jenis kelamin sebesar 10 %, sedangkan tahun 2004 turun menjadi 10,5 %. Menurut kelompok umur, sampai umur 19 tahun, umumnya rasio jenis kelamin masih diatas 100, kemudian turun sampai umur 39 tahun 2004 dan tahun 2005.

G. TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak merata merupakan salah satu ciri dari Daerah yang sedang berkembang seperti juga memiliki ciri – ciri yang mirip dengan ciri penduduk Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali serta persebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pelaksanaan program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Sebagai hasil dari interaksi komponen dinamika penduduk, yang terdiri atas kelahiran, kematian, dan perpindahan, penduduk Kota Sabang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) penduduk berjumlah 28,597 jiwa dan angka tersebut meningkat menjadi 1,23 % pada tahun 2005

(hasil SP 2002). Sedangkan berdasarkan hasil perkiraan penduduk tahun 2002 berjumlah 24 ribu/jiwa. Hal ini berarti selama kurun waktu 2002–2005 rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23 % pertahun. Laju pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding hasil 2 sensus sebelumnya yaitu pada kurun waktu 1971-1980 sebesar 1,2 % pertahun dan pada kurun waktu 1980–1990 sebesar 1,2 % pertahun. Selama kurun waktu 2005 – 2005 angka pertumbuhan penduduk tidak mengalami penurunan. Dengan demikian ada kecenderungan penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kota Sabang selama periode 2002 – 2005 diperkirakan terjadi karena keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam menurunkan tingkat kelahiran.

1. Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan

Selama periode 2002 – 2005 terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari pada di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama periode 2000 – 2005 yaitu sebesar 1,4 % pertahun dan di daerah pedesaan selama periode yang sama sebesar 1,1 % pertahun.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan dimungkinkan selain karena terjadi pengembangan wilayah pedesaan menjadi wilayah perkotaan juga dipengaruhi oleh migrasi terutama perpindahan penduduk dari desa ke kota (Urbanisasi). Dorongan penduduk untuk melakukan perpindahan dari desa menuju kota antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan pemerintahan.

Selain itu dengan tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dengan mutu yang lebih baik serta lengkapnya fasilitas-fasilitas lain, menarik minat pendatang untuk berdomisili di daerah perkotaan. Kenyataan lain memperlihatkan bahwa persentase penduduk yang berdomisili di daerah perkotaan meningkat dari 25,3 % pada tahun 2004 menjadi 25,5 % pada tahun 2005. Jika dilihat dari jenis kelamin tahun 2004 dan tahun 2005 rata-rata laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena tingkat migrasi keluar penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada penduduk perempuan. Migrasi keluar untuk penduduk laki-laki terutama didominasi oleh penduduk usia kerja untuk mencari nafkah maupun melanjutkan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya budaya yang keliru yang masih melekat di masyarakat terutama yang membatasi gerak/pergaulan penduduk perempuan terbatas dilingkungan sekeliling rumah. Selain itu juga seperti dimaklumi bahwa masyarakat di Kota Sabang, penduduknya gemar merantau.

Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Sabang tergolong masih rendah dibanding tingkat nasional, walaupun demikian rata-rata laju pertumbuhan cenderung menurun. Jumlah penduduk yang besar dari kota Sabang merupakan sumber daya

yang potensial bagi pembangunan. Walaupun demikian jika sumber daya tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal serta kualitasnya rendah, mungkin justru akan memperlambat jalannya pembangunan. Penduduk yang besar akan memerlukan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk keperluan hidupnya. Sedangkan biaya untuk penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut terbatas.

H. PENDIDIKAN

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 dan GBHN, dimana dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang maksudnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial.

Pemerintah Kota Sabang saat ini terus berusaha untuk memacu pembangunan dibidang pendidikan di seluruh pelosok daerah baik terhadap sarana maupun prasarana pendidikan. Dengan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan ini diharapkan hasil yang dicapai dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejauh mana amanat ini dilaksanakan tercermin antara lain dari profil pendidikan penduduk yang akan dibahas secara singkat dalam uraian berikut.

1. Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

Sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan yaitu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, diantaranya melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, yang mencerminkan tingkat kecerdasan/kepandaian formal dari penduduk suatu negara/daerah.

Pendidikan sebagian besar penduduk Kota Sabang masih rendah, menurut hasil perkiraan sekitar 854 orang (15,94 %) penduduk berumur 5 tahun ke atas tidak/belum pernah sekolah dan sekitar 5.414 orang (25,55 %) tidak/belum tamat SD. Penduduk yang berpendidikan tamat SLTA atau di atasnya (SLTA +) baru sekitar 44 %.

Bedasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan diperoleh gambaran adanya perbedaan yang cukup berarti antara laki-laki dan perempuan. Secara umum tingkat pendidikan perempuan masih lebih rendah dari laki-laki. Penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah adalah sebesar 217.657 orang (11,65 %), sementara

untuk penduduk laki-laki hanya sekitar 140.056 orang (7,50 %). Disisi lain, penduduk yang tamat SLTA + adalah sebesar (18,14 %) untuk laki-laki berbanding (14,16 %) untuk perempuan. Perbedaan ini mungkin disebabkan antara lain karena masih adanya pandangan masyarakat yang mendahulukan anak laki-laki untuk bersekolah dibandingkan anak perempuan.

2. Penduduk yang masih Sekolah

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pendidikan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sudah dianggap sebagai kegotuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Akibatnya setiap tahun selalu ditemui masalah ketidakseimbangan antara penduduk yang ingin bersekolah atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan daya tampung yang tersedia. Penyelesaian masalah ini menuntut/ mengharuskan adanya tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat dibidang pengadaan dan pelayanan pendidikan.

Persentase penduduk dari setiap golongan umur yang sekolah atau angka partisipasi sekolah sekitar 15,96 % penduduk golongan umur 5-6 tahun yang masih sekolah karena memang umumnya anak mulai sekolah pada usia 7 tahun. Pada umur 7-12 tahun terdapat sekitar 13,54 % penduduk yang masih sekolah, umur 13-15 tahun sekitar 7,88 %, umur 16-18 tahun 1,179 orang (8,39 %) dan umur 19-24 tahun (12,64 %) dari seluruh penduduk pada masing-masing kelompok usia sekolah.

Jika dilihat dari jensi kelamin, persentase penduduk laki-laki usia 5-24 tahun yang masih sekolah lebih tinggi dbandingkan dengan penduduk perempuan yaitu 50,11 % berbanding 44,64 %. Penduduk yang berumur 7-12 tahun yang masih sekolah pada Sekolah Dasar (SD) baik laki-laki maupun perempuan relatif sama yaitu mencapai 80 % lebih. Dari data tersebut terlihat adanya kecenderungan anak laki-laki lebih terlambat masuk/mulai sekolah atau menyelesaikan sekolah dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya tuntutan yang lebih besar terhadap anak laki-laki untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga sehingga sedikit banyak pendidikan mereka akan terganggu.

I. KETENAGAKERJAAN

Berbicara masalah ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah kependudukan, terutama tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Dengan penambahan penduduk usia kerja akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Petambahan angkatan kerja tersebut dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tercipta

karena program pembangunan dan sebagian lagi telah berusaha menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, yang termasuk sebagai pekerjaan disektor informal. Namun tidak semua angkatan kerja tersebut dapat tertampung ada lapangan kerja yang tersedia dengan demikian perluasan dan penyediaan lapangan kerja sangat diperlukan dalam pembangunan sekarang dan masa datang.

Dalam era pembangunan sekarang ini dituntut sumber daya manusia yang bermutu dan bekemampuan maksimal. Sebagai konsekuensinya tenaga kerja yang ada harus benar-benar menguasai bidangnya. Namun kenyataannya tenaga kerja yang ada sekarang ini tidak semuanya sesuai dengan bidangnya dan masih banyak juga yang bekerja tidak penuh, sehingga akan menimbulkan pengangguran terselubung. Sedangkan penduduk usia kerja telah melampaui pasaran tenaga kerja dan angkatan kerja yang ada belum tentu sudah siap pakai. Oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan harus selaras dengan keadaan dilapangan, sehingga tidak banyak menimbulkan pengangguran.

1. Angka Beban Tanggungan Angkatan Kerja

Angka ini menunjukkan perkiraan banyaknya penduduk yang diasumsikan tidak produktif (umur dibawah 15 dan diatas 64 tahun) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (berumur 15-64 tahun). Pola struktur umur penduduk yang masih muda ternyata mempengaruhi tingginya angka beban tanggungan di Kota Sabang yang memiliki angka beban tanggungan yang relatif cukup tinggi. Dari hasil perkiraan penduduk tahun 2005, angka beban tanggungan angkatan kerja diperkirakan sebesar 56,93 yang berarti setiap 100 orang produktif harus menanggung 57 orang tidak produktif. Bila dibandingkan dengan tahun 2005 angka beban tanggungan tersebut mengalami penurunan, dimana pada tahun 2005 tercatat sebesar 58,11 %.

2. Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk yang berusia 10-64 tahun adalah penduduk yang tergolong dalam pengertian usia kerja. Mereka yang termasuk dalam usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan meskipun sementara tidak bekerja dan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi mereka sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan kegiatan paling kurang satu jam berturut-turut dalam seminggu dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan. Penduduk yang hanya sekolah (murid/mahasiswa) dan mereka yang hanya mengurus

rumah tangga, pensiunan, jompo, cacat, dll, tidak termasuk dalam pengertian angkatan kerja.

Berdasarkan angka perkiraan tahun 2005, di Kota Sabang terdapat angkatan kerja sebanyak 5.900 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 90,90 % dan jumlah yang mencari kerja 591 orang serta jumlah pengangguran 709 di dua Kecamatan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sabang pada tahun 2005 adalah sebesar 32,8 %. Ini berarti dari 100 penduduk usia 10 tahun keatas terdapat 1.155 penduduk angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Sedangkan bila dirinci menurut jenis kelamin maka angkanya tercatat sebesar 71,20 % laki-laki dan 41,43 % perempuan. Sedangkan tingkat kesempatan kerja bila dilihat dari jenis kelamin terdiri dari 93,05 % untuk laki-laki dan 92,89 % untuk perempuan. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 7,01 % yang terdiri dari laki-laki 6,95 % dan perempuan.

3. Status dan Lapangan Pekerjaan

Indikator mengenai ketenagakerjaan adalah pekerja menurut status pekerjaan yang dapat dilihat pada tahun 2005 sebagian besar pekerja berusaha dengan dibantu pekerja atau buruh, karyawan tidak dibayar yaitu sebesar 28,60 % dan terbanyak kedua adalah pekerja atau buruh karyawan dibayar sebesar 23,99 %.

Komposisi distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan pada tahun 2005 masih timpang antara satu sektor dengan sektor lainnya. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam hal ini tercatat sebesar 11,43 % setelah sektor jasa sebesar 34,97 %. Sektor pertanian diamati beberapa tahun sebelumnya terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya lahan pertanian produktif karena tergusur (diambil alih) oleh sektor non pertanian, terutama sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa.

4. Jabatan dan Pendidikan Pekerja

Struktur ekonomi suatu negara, dalam hal ini di Kota Sabang nampaknya berhubungan dengan tingkat pendidikan penduduknya. Sebagai negara agraris yang sebagian terbesar penduduknya adalah petani, tingkat pendidikan penduduk secara umum masih tergolong rendah karena pekerjaan pada sektor pertanian umumnya tidak mengharuskan para pekerja untuk berpendidikan tinggi. Untuk Kota Sabang penduduk yang berusia 10 tahun keatas sebagian besar penduduknya hanya berpendidikan sampai Sekolah Dasar (SD). Walaupun demikian pembangunan dibidang pendidikan telah menunjukkan hasilnya yang ditandai oleh berkurangnya persentase penduduk

yang berpendidikan SD yang diikuti oleh meningkatnya persentase mereka yang berpendidikan SLTP ke atas.

Penduduk 10 tahun keatas yang bekerja menurut jenis pekerjaan/jabatan pada tahun 2005 masih didominasi oleh tenaga usaha pertanian sebesar 66,11 % yang terdiri dari 58,53 % laki-laki dan 69,71 % adalah perempuan. Urutan selanjutnya yaitu tenaga penjualan tercatat sebesar 17,56 % yang terdiri dari 18,57 % laki-laki dan 15,04 % perempuan. Sedangkan yang terendah adalah untuk jenis pekerjaan/jabatan kepemimpinan dan ketatalaksanaan yakni hanya 0,13 % dan sebagian besar pada posisi ini ditempati oleh kaum laki-laki.

J. KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan. Hubungan tersebut bersifat timbal balik. Pembangunan sosial ekonomi akan mempengaruhi kualitas lingkungan, kualitas lingkungan akan mempengaruhi kesehatan, dan pada akhirnya kesehatan masyarakat sebagai salah satu modal dasar pembangunan akan mempengaruhi pembangunan itu sendiri. Kesehatan masyarakat harus selalu dijadikan acuan dalam setiap langkah pembangunan baik sebelum maupun selama berjalannya kegiatan pembangunan. Adalah mutlak bagis setiap individu anggota masyarakat untuk memperoleh kesehatan dasar agar dapat berperan serta dalam pembangunan. Pembangunan kesehatan di Kota Sabang diarahkan pada tewujudnya “Kota Sabang Sehat Tahun 2010 Bernuansa Islami” melalui pelayanan kesehatan yang bernuansa islami.

- **Sektor Kesehatan**

Telah banyak sumber daya kesehatan diinvestasikan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Sabang indikator-indikator kesehatan yang digunakan untuk memantau perkembangan derajat kesehatan masyarakat seperti angka kematian ibu dan angka kematian bayi menunjukkan penurunan seiring dengan semakin meningkatnya status gizi masyarakat dan umur harapan hidup waktu lahir. Memerlukan rawat jalan dirumah sakit memiliki kesamaan pola dengan pasien rawat jalan di puskesmas. Hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan dan prilaku kesehatan yang masih kurang.

- **Penyakit Menular**

- a. **D i a r e**

Penyakit diare adalah penyakit yang banyak menyerang golongan umur anak-anak balita. Penyakit ini dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan dan kualitas hidup anak. Program pemberantasan penyakit ini dilakukan

melalui edukasi dan peningkatan kemampuan penanggulangan kasus oleh petugas lapangan. Tingkat keberhasilan dari program ini, dimana tidak dijumpai kematian (CFR = 0,0 %) dari jumlah penderita sebanyak 6.696 jiwa.

b. Rabies

Rabies termasuk salah satu jenis penyakit yang disebabkan gigitan anjing gila. Penyakit ini dapat menyerang semua golongan umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Selama tahun 2005 terdapat 13 penderita, 2 diantaranya meninggal dunia.

c. Malaria Tertiana dan Tropika

Penyakit ini mengalami penurunan dibandingkan tahun yang lalu, yakni berkurang 50 % dari umlah 40 orang menjadi 20 orang lagi.

• **Gambaran Sumber Daya**

Pembangunan kesehatan dapat berdaya guna jika unsur sumber daya tenaga, pembiayaan dan sarana kesehatan terpenuhi secara simultan dan seimbang dengan kebutuhan.

K. TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan di Kota Sabang masih sangat terbatas, keterbatasan itu hampir pada semua jenis tenaga. Sampai tahun 2005 tenaga kesehatan berjumlah lebih kurang 157 orang. Tentu saja jumlah tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Sabang yang sudah mencapai 28 ribu lebih. Secara umum distribusi tenaga kesehatan di Kota Sabang sangat minim. Sedangkan distribusi tenaga dokter umum pada tahun 2005 per seribu penduduk berdasarkan data pada Dinkes. Terlihat bahwa ratio tenaga dokter/dokter spesialis adalah sebesar 2 per 24 ribu penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa 27 orang dokter harus memberikan pelayanan kepada penduduk atau setiap dokter melayani 1.682 orang penduduk.

Selain tenaga dokter, tenaga bidan juga masih sangat terbatas, ratio bidan di Kota Sabang sebesar 74 orang. Hal ini berarti setiap tenaga bidan melayani 1.064 orang penduduk. Bila diperkirakan dalam 824 orang penduduk terdapat 120 ibu hamil dalam setahun maka dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga bidan di Kota Sabang cukup memadai untuk memberikan perlindungan kepada ibu-ibu hamil/ melahirkan.

L. SARANA KESEHATAN

Usaha peningkatan kesehatan masyarakat sampai saat ini yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Sabang adalah perluasan jangkauan pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan sebagainya merupakan sarana dan prasarana kesehatan yang keberadaannya ditengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Puskesmas, Puskesmas Pembantu pada Tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2004. Persentase kenaikan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu masing-masing adalah 1,39% dan 33,33%, hal ini disebabkan oleh banyaknya donor dari Negara-negara asing yang membantu Aceh yang difasilitasi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sedangkan jumlah rumah sakit belum berubah. Dengan demikian upaya kesehatan dalam periode tahun 2005 tampak semakin meningkat. Namun itu saja tidaklah cukup, karena masih memerlukan partisipasi masyarakat disekeliling prasarana tersebut untuk menghargai, memelihara dan berpartisipasi didalamnya, dan tersedianya petugas medis dokter berjumlah sebanyak 27 orang diantaranya dokter umum, spesialis dan dokter gigi sedangkan bidan 74 orang dibantu oleh 56 orang perawat. Dan paramedis untuk selalu siap sedia membantu masyarakat disekelilingnya. Sementara tercatat jumlah Rumah Sakit Umum di Kota Sabang 1 buah, dan Rumah Sakit TNI-AL 1 buah, dan Puskesmas 4 buah dan 8 buah puskesmas pembantu yang tersebar di 2 kecamatan.

M. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Untuk mengukur keadaan ekonomi suatu wilayah selain dilihat produktifitasnya dilihat juga indikator agregat ekonomi makro lainnya yaitu Produk Domestic Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat Provinsi/Kabupaten. Untuk PDRB yang dipakai disini adalah menurut pendekatan produksi yaitu jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kota Sabang dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu : pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik dan air minum; bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

Dilihat PDRB Kota Sabang atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha, baik besaran nominalnya maupun kontribusinya. PDRB untuk selsuruh sektor pada tahun 2004 ke tahun 2005 tampak mengalami kenaikan.

Penyumbang terbesar untuk tahun 2004 dan 2005 adalah dari sektor jasa dan pertanian, masing-masing 34,97 % untuk tahun 2005 dan 11,43 %.

Indeks perkembangan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku terjadi peningkatan dari tahun 2004 ke tahun 2005 sebesar 8,10 % sedangkan atas dasar harga konstan hanya sedikit terjadi peningkatan yakni sebesar 1,22 %.

N. PARIWISATA

Kota Sabang yang terletak diujung paling barat kepulauan nusantara memiliki luas wilayah lebih kurang 153 Km², yang berarti 4,17 % dari luas wilayah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, baik obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata dan jasa kepariwisataan.



Gambar. II-5 Para Turis Sedang Menikmati Keindahan Gapang

Karena potensi yang dimikian, pemerintah Kota Sabang bertekad menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dan andalan dalam menghasilkan devisa sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tekad tersebut Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai analisis dan kajian untuk mengetahui secara pasti kondisi obyek dan daya tarik wisata, potensi dan fasilitas yang tersedia (sarana wisata) serta jasa kepariwisataan. Dengan diketahuinya semua itu maka kebijaksanaan yang diambil terutama untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke daerah ini lebih berhasil.

a) Obyek dan Daya Tarik Wisata

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan telah membagi obyek dan daya tarik wisata ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Minat Khusus. Ketiga kelompok obyek

dan daya tarik wisata tersebut terdapat di Kota Sabang dan untuk saat ini jumlahnya diperkirakan sebanyak 31 buah yang tersebar di setiap 2 (dua) Kecamatan.

Kendati pun memiliki cukup banyak obyek dan daya tarik wisata, namun tidak semua obyek dan daya tarik wisata tersebut dikelola secara profesional. Umumnya pertumbuhan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kota Sabang berkembang secara alami dan belum ada investor yang menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan beberapa kendala yang dihadapi terutama faktor pariwisata sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah amat diperlukan untuk membina dan mengembangkannya terutama obyek dan daya tarik wisata yang telah mulai dikunjungi wisatawan.

Pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan fasilitas wisata, jalan masuk ke obyek dan berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan rangsangan kepada calon investor agar suatu saat mereka berminat untuk melakukan investasi dalam membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata. Untuk tahap awal sebaiknya dipilih obyek dan daya tarik wisata potensial untuk dikembangkan.

b) Sarana Pariwisata

1. Akomodasi

Kota Sabang memiliki 1 hotel berbintang yang terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 3 unit, hotel kelas menengah sebanyak 2 unit, dan losmen sebanyak 3 unit. Selain hotel berbintang, di daerah ini juga terdapat Bunggalaw yang tersebar di setiap kawasan objek wisata yang berjumlah 125 buah.

Keberadaan sebuah hotel dikalangan pariwisata amat penting artinya sebab setiap wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang akan memanfaatkan hotel sebagai tempat istirahat mereka. Penyediaan fasilitas hotel, baik hotel berbintang maupun hotel melati di daerah ini telah disesuaikan dengan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Aceh dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Terlebih lagi sejak diberlakukannya syariat Islam secara kaffah.

2. Restoran dan Rumah Makan

Usaha restoran dan rumah makan semakin berkembang di Kota Sabang sejalan dengan berkembangnya sektor pariwisata. Saat ini usaha restoran dan rumah makan menjadi titik perhatian dalam pembinaannya karena service restoran dan rumah makan ternyata mampu menarik minat bagi wisatawan untuk berwisata ke Kota Sabang, bahkan ada diantara wisatawan

yang telah berkunjung ke Kota Sabang berusaha untuk datang lagi guna menikmati hidangan disalah satu rumah makan yang ada di Kota Sabang. Jumlah rumah makan saat ini di Kota Sabang sebanyak 4 buah dengan kapasitas 228 kursi (Analisa Pasar Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2003, Dinas Pariwisata)

3. Angkutan Wisata

Transportasi merupakan sarana pokok bagi pengembangan usaha pariwisata. Wisatawan yang berkunjung ke salah satu tujuan wisata memerlukan sarana transportasi. Khusus untuk angkutan wisata pada dasarnya belum dimiliki oleh pengelola usaha pariwisata terutama biro perjalanan wisata. Sungguh pun demikian sarana transportasi umum saat ini cukup tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh setiap wisatawan. Kondisi angkutan umum tersebut cukup baik dan layak digunakan oleh setiap wisatawan. Umumnya kondisi bus umum. Transportasi laut tersebut cukup baik dan menyenangkan walaupun untuk melakukan perjalanan jarak jauh.

c) Jasa Pariwisata

1. Usaha Biro Perjalanan Wisata

Biro perjalanan wisata memegang peranan penting dalam kegiatan kepariwisataan karena arus kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata sangat tergantung dari peran biro perjalanan. Di Kota Sabang saat ini terdapat 2 biro perjalanan wisata.

2. Pramuwisata

Kota Sabang saat ini memiliki 70 pramuwisata yang siap pakai dengan kualifikasi bahasa asing yang dikuasai adalah Bahasa Inggris dan Jerman. Tetapi untuk saat ini belum ada perusahaan yang khusus bergerak dibidang jasa pramuwisata di daerah ini.

d) Realisasi Kunjungan Wisata

1. Wisatawan Mancanegara

Target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Sabang pada tahun 2003 mengalami penurunan akibat diberlakukannya Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Memperhatikan potensi pariwisata di Kota Sabang yang begitu lengkap, baik itu obyek dan daya tarik wisata maupun sarana pariwisata serta sikap

masyarakat dalam membudayakan sapta pesona memiliki arti penting bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Namun sangat disayangkan kondisi Aceh yang tidak kondusif mengakibatkan arus kunjungan wisatawan pada tahun 2005 mengalami penurunan. Pariwisata mengalami peningkatan, tetapi kunjungan wisatawan lokal.

2. Wisatawan Nusantara

Selain wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara juga banyak berkunjung ke Kota Sabang obyek kunjungan wisatawan nusantara terutama berkaitan dengan penelitian dan ilmu pengetahuan. Disamping penelitian dan belajar, mereka juga menikmati secara leluasa obyek-obyek wisata yang ada di daerah ini seperti taman laut di Pulau Rubiah.

O. TRANSPORTASI

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari jumlah kendaraan bermotor (darat, laut dan udara), dan kuantitas maupun volume angkutannya yang setiap tahun meningkat. Meningkatnya arus lalu lintas, selain kemanfaatannya perlu juga dipikirkan dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup. Telah diketahui bahwa kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab terjadinya polusi, baik didarat, laut maupun diudara, sedang perhatian kita kearah itu masih sangat kurang. Zat-zat buangan dari hasil pembakaran kendaraan bermotor dapat mengakibatkan pencemaran udara, yang dampaknya terhadap lingkungan tidak kalah dari pencemaran limbah industri. Untuk itu memerlukan perhatian khusus dalam penanggulangannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pembangunan transportasi di Kota Sabang diarahkan agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas serta pembangunan dengan menembus isolasi dan keterbelakangan daerah terpencil dan tertinggal. Disamping itu juga untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi, baik untuk pelayanan untuk tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional sehingga akan semakin mendukung kegiatan pembangunan ekonomi yang terus meningkat.

a. Kebijakan Pembinaan Jaringan Jalan

Sasaran dan kebijaksanaan pembangunan prasarana jalan di Kota Sabang diarahkan untuk lebih memperlancar arus mobilitas orang, barang, dan jasa. Sampai dengan akhir tahun 2003 perkembangan prasarana jalan telah memberikan hasil yang memadai dalam arti tetap mampu melayani pertumbuhan lalu lintas angkutan yang cukup pesat. Keadaan tersebut telah pula memberikan kontribusi yang berarti dalam

memperlancar mobilitas ke seluruh wilayah terutama daerah pedesaan, daerah Anoi Itam dan daerah tertinggal serta daerah pemukiman baru. Transportasi darat merupakan penunjang terpenting dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu transportasi darat harus berdayaguna sesuai dengan fungsi utamanya menyediakan jasa perhubungan sesuai kebutuhan dengan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, tepat, teratur, dan terjangkau oleh masyarakat.

Sesuai dengan kondisi geografis Kota Sabang, dalam pembinaan jaringan jalan dibagi berdasarkan lintas utama antar daerah dan antar provinsi sebagai berikut.

b. Kondisi Prasarana Jalan

Sampai dengan akhir tahun 2005 pembangunan prasarana jalan di Kota Sabang telah mencapai sepanjang 102,66 Km. Perkembangan pembangunan prasarana jalan selama tahun 2005 dapat dilihat pada data Kimpraswil.

c. Perkembangan Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan di Kota Sabang untuk semua jenis kendaraan setiap tahun meningkat. Ini disebabkan karena pertambahan jumlah kendaraan bermotor itu sendiri lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduknya.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan prasarana jalan, Perkembangan kendaraan bermotor di Kota Sabang dalam tahun 2005 juga meningkat, untuk jenis kendaraan tidak umum berjumlah 2.053 unit, dan untuk jenis kendaraan umum (minibus) sebanyak 65 unit. Sedangkan jumlah jenis kendaraan angkutan barang juga meningkat, Pada tahun 2005 sebanyak 75 unit. Perkembangan kendaraan jenis angkutan barang tersaji pada data analisa.

d. Perkembangan Usaha Angkutan

Dilihat dari pola jaringan transportasi laut Kota Sabang dengan Provinsi (AKDP), sesuai dengan kondisi geografis dan perkembangan prasarana jalan saat ini secara umum dapat dibagi menjadi 2 lintasan Balohan dan jalur Sabang KM Nol.

Bus Standar (Besar) dengan kapasitas tempat duduk sekurang-kurangnya 31 dengan menggunakan fasilitas pelayanan ekonomi maupun non ekonomi.

b) Bus sedang dengan kapasitas tempat duduk berkisar 20 sampai dengan 30 orang dan sebagian besar menggunakan fasilitas pelayanan ekonomi dan sebagian kecil menggunakan pelayanan non ekonomi.

c) Bus kecil dengan kapasitas tempat duduk berkisar 9 sampai dengan 19 set yang keseluruhannya merupakan jenis pelayanan ekonomi.

- d) Mobil penumpang umum yang melayani trayek AKDP jarak dekat terutama trayek-trayek dari Kota ke Daerah objek wisata.

Mengenai jumlah armada yang melayani trayek AKDP dalam tahun 2003 disamping trayek antar kota dan trayek objek wisata, dikenal pula trayek angkutan pedesaan, yaitu seluruh trayek yang berada dalam satu wilayah kabupaten / kota. Di Kota Sabang hanya tiga wilayah yang tidak mempunyai trayek angkutan pedesaan yaitu untuk kebutuhan angkutan di daerah pedesaan di dua Kecamatan dilayani oleh Perusahaan yang memiliki izin trayek Antar Kota Dalam Kota Sabang (AKDP) yang menghubungkan jaringan trayek antar kecamatan dalam kabupaten tersebut.

Secara keseluruhan jumlah perusahaan dan jumlah armada yang melayani jaringan trayek di masing-masing Kabupaten dalam Kota Sabang dapat dilihat dalam jenis kendaraan yang di operasikan pada trayek angkutan pedesaan sebagian merupakan mobil penumpang umum dan sebagian merupakan bus kecil atau bus sedang.

BAB III

AIR

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan fungsinya bagi kehidupan tidak pernah tergantikan. Kualitas air yang dikonsumsi harus memiliki kemurnian yang tinggi sehingga tidak mengganggu proses metabolisme makhluk hidup tersebut, baik dikonsumsi oleh manusia maupun dikonsumsi oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan dapat berupa penyakit menular maupun yang tidak menular. Untuk mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan penggunaan air, maka kualitas badan air harus dijaga sesuai dengan baku mutu air sesuai PP RI No. 82 tahun 2001 (Ricki M. Mulia, 2005).

Di kota Sabang sumber air utama yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah dari danau.

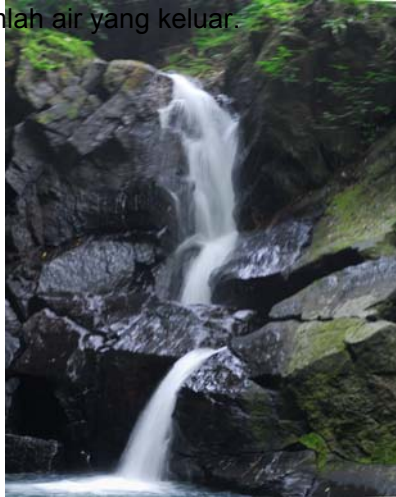
Danau adalah salah satu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Bagi manusia kepentingannya jauh lebih berarti daripada luas daerahnya. Terkadang untuk memenuhi kepentingan manusia, lingkungan sekitar danau diubah untuk dicocokkan dengan cara hidup dan bermukim manusia. Ruang dan tanah di sekitar kawasan ini dirombak untuk menampung berbagai bentuk kegiatan manusia seperti pemukiman, prasarana jalan, saluran limbah rumah tangga dan tanah pertanian sehingga seringkali terjadi pemanfaatan danau dan konservasi danau yang tidak berimbang. Hal ini dapat mengakibatkan danau berada pada kondisi suksesi, yaitu berubah dari ekosistem perairan ke bentuk ekosistem daratan.



Gambar.III-1. Danau Aneuk Laot dari Arah Timur

Danau Aneuk Laot merupakan salah satu ekosistem air tawar andalan masyarakat Kota Sabang. Danau ini memiliki fungsi penting bagi kehidupan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya air, hal ini penggunaan air oleh masyarakat Kota Sabang bersumber dari danau ini yang pendistribusiannya dilakukan oleh PDAM Tirta Aneuk Laot Kota Sabang. Fungsi lainnya adalah penyimpan air dan sebagai kesatuan ekologi penting. Danau Aneuk Laot memiliki luas permukaan 384.283 m² (38,4 Ha) dengan kedalaman rata-rata 20 m. Bagian barat dan selatan danau terdapat hutan lindung sedangkan selebihnya merupakan pemukiman, ladang dan kebun masyarakat. Lima tahun terakhir ini permukaan air danau mengalami penurunan yang drastis. Bebatuan di tepi danau menyisakan garis bekas tinggi permukaan yang sebelumnya.

Hasil penelitian BPPT (2005) menjelaskan bahwa penurunan kuantitas sumberdaya air Danau Aneuk Laot kemungkinan disebabkan oleh penurunan intensitas curah hujan, pemanfaatan air danau secara langsung dan pelebaran rekahan danau akibat gempa. Hal ini menyebabkan jumlah air yang masuk lebih kecil daripada jumlah air yang keluar.



Gambar. III-2 Air Terjun Pria Laot
Teupin Reuteuk



Gambar.III-3. Sumber Air

Dari hasil pemantauan kualitas air di kota sabang yang dilaksanakan selama tahun 2007 di beberapa titik, Danau Aneuk Laot, Mata le Jaboi, Mata le Teupin Reuteuk, Air Terjun Pria Laot. Dapat Disimpulkan bahwa kualitas air di kota sabang masih layak untuk di konsumsi,sesuai dengan baku mutu air PP RI No. 82 Tahun 2001.

BAB IV

UDARA

Udara diperlukan manusia setiap saat dalam kehidupannya. Untuk itu maka kualitas udara yang layak harus tersedia untuk mendukung terciptanya kesehatan masyarakat. Ketentuan mengenai kualitas udara di Indonesia di atur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Standar tentang batas-batas pencemar udara secara kuantitatif diatur dalam baku mutu udara ambient dan baku mutu emisi. Baku mutu udara ambien mengatur batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda.

Secara umum di kota Sabang belum dilakukan pemeriksaan kualitas udara secara rutin, hal ini disebabkan oleh belum tersedianya peralatan pemantauan kualitas udara yang memadai. Juga disebabkan oleh kondisi wilayah yang berbentuk kepulauan, sehingga setiap saat terjadi pertukaran udara di daerah. Kondisi aktifitas kendaraan bermotor juga tidak terlalu padat, dan didukung oleh masih banyaknya terdapat taman kota yang bias secara maksimal untuk mengurangi emisi yang ditimbulkan oleh aktifitas kendaraan bermotor di Kota Sabang. Namun demikian, pengendalian terhadap emisi harus terus dilakukan untuk mendapatkan kondisi udara yang bersih dan sehat.



Gambar.IV-1. Kondisi Udara di wilayah Kota Sabang.

BAB V

LAHAN DAN HUTAN

Luas Lahan Terbuka

Luas wilayah Kota Sabang 153 km², dimana wilayah Kota Sabang yang paling luas adalah Kecamatan Sukajaya 80 km² kemudian baru diikuti oleh kecamatan Sukakarya 73 km² tersebut alokasi penggunaan yang paling besar adalah sebagai perkebunan 5758.00 ha kemudian baru diikuti oleh hutan lindung seluas 4832.98 ha, Padang rumput 23 ha perairan danau 310 dta, rawa 40 ha, pertanian tanah kering 41 ha, kampung 1073.00 ha, tanah terbuka 1450.52 ha, industri 6 ha, hutan wisata 1413.50 ha dan tambak 64 ha. Pembukaan lahan untuk pembangunan fasilitas perumahan bagi pengungsi korban tsunami merupakan hal yang harus dilakukan karena rusaknya kawasan pesisir akibat gelombang tsunami sehingga rumah nelayan dan penduduk di pesisir menjadi rusak. Pembukaan lahan ini dilakukan pada daerah yang baru dan memerlukan pembukaan lahan. Titik-titik penggunaan wilayah ini adalah BlangTunong, Pria Laot, Tapak Gajah, Cot Abeuk. Penggunaan lahan untuk pembangunan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan lingkungan yaitu dengan melaksanakan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.



Gambar V-1 Pembukaan Lahan untuk Pembangunan Perumahan Pengungsi

Produktivitas tanaman pertanian di Kota Sabang dapat di kelompokkan ke dalam produksi hortikultura 832.2 ton/ha, sayur-sayuran 2776,25 ton/ha, dan buah-buahan 475.83 ton/ha. Pada umumnya jenis produksi pertanian tersebut di konsumsi untuk keperluan daerah.

Penggunaan Pupuk

Berbagai jenis komoditi pertanian yang diusahakan oleh para petani, baik berupa padi / palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan di dalam proses produksinya menggunakan pupuk. Beberapa jenis yang dipergunakan tersebut adalah urea, ZA, SP-36, dan KCL. Untuk jenis pupuk urea, penggunaannya yang paling banyak adalah pada tanaman padi /palawija (61.298 ton; 1.138 kg/ha), kemudian baru diikuti tanaman sayur-sayuran (59 ton; 725 kg/ha), dan buah-buahan (5 ton; 56 kg/ha). Pada kelompok tanaman padi/palawija, jenis tanaman yang paling banyak menggunakan pupuk urea adalah padi sawah (51.332 ton; 175 kg/ha), kemudian baru diikuti oleh tanaman lain seperti jagung (4.385 ton; 225 kg/ha), kacang kedelai (3.037 ton; 50 kg/ha), ubi kayu (1.336 ton; 250 kg/ha). Selanjutnya untuk pupuk ZA, penggunaannya yang paling banyak adalah pada tanaman padi/palawija (33.363 ton; 210 kg/ha), kemudian baru diikuti oleh tanaman buah-buahan (3.170 ton; 1.100 kg/ha) dan tanaman sayur-sayuran (427 ton; 550 kg/ha). Pada kelompok tanaman padi/palawija yang banyak menggunakan pupuk ZA adalah tanaman padi sawah (29.332 ton; 100 kg/ha) dan kacang kedelai (3.037 ton; 50 kg/ha). Sedangkan pada kelompok tanaman buah-buahan adalah tanaman jeruk (2.634 ton; 500 kg/ha).

Penggunaan pupuk SP-36 pada tanaman pertanian yang paling banyak adalah tanaman padi/palawija (49.029 ton; 900 kg/ha), dimana yang paling banyak adalah untuk tanaman padi sawah (36.665 ton; 125 kg/ha), dan kemudian kacang kedelai (6.073 ton; 100 kg/ha), dan jagung(4.385 ton; 225 kg/ha).Sedangkan pada kelompok tanaman buah-buahan yang paling banyak penggunaannya adalah tanaman jeruk (2.634 ton; 125 kg/ha); dan pada kelompok tanaman sayur-sayuran adalah tanaman kentang(478 ton; 300 kg/ha).

Penggunaan pupuk KCl yang paling banyak dipergunakan adalah pada tanaman padi/palawija (19.430 ton; 375 kg/ha, kemudian tanaman buah-buahan(2.444 ton; 740 kg/ha) dan sayur-sayuran (296 ton; 375 kg/ha). Pada kelompok tanaman padi/ palawija yang paling banyak menggunakan pupuk KCl adalah pada tanaman padi sawah (14.666 ton; 50 kg/ha), sedangkan pada kelompok tanaman buah-buahan adalah jeruk (1.712 ton; 325 kg/ha) dan sayur-sayuran adalah kentang (159 ton; 100 kg/ha). Berbagai jenis pupuk tersebut diperoleh para petani melalui toko saprotan yang terdapat di wilayah Kota Sabang, yang pasokannya umumnya berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam disamping itu juga berperan jenis pupuk penyalurannya dilakukan melalui koperasi pertanian setempat.

Penggunaan Pestisida

Dalam hal pemakaian pestisida oleh para petani hingga saat ini datanya belum dikumpulkan secara baik sehingga tidak dapat di sajikan pada data diatas. Meskipun demikian pada kenyataannya para petani didalam memelihara tanamannya kadang kala harus menggunakan pestisida yang bertujuan untuk meningkat jumlah produksi dan kualitas hasil produksinya.

Peternakan

Kegiatan peternakan di wilayah Kota Sabang diusahakan oleh masyarakat dalam skala rumah tangga. Dalam hal ini komoditi yang diusahakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis ternak dan unggas. Yang termasuk ke dalam hewan ternak yang dipelihara di Kota Sabang, kerbau, kambing, domba, babi, dan kuda; sedangkan jenis unggas yaitu ayam kampung, ras / petelur, pedaging, dan itik.

Jumlah produksi masing-masing hewan ternak pada tahun 2005 yaitu sapi sebanyak 2.218 ekor, kerbau sebanyak 84 ekor, kambing sebanyak 5.221 ekor; domba sebanyak 17 ekor. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat diketahui jenis hewan ternak yang lebih diminati oleh para peternak yaitu sapi, kambing, kerbau, dan domba. Pada umumnya jenis-jenis hewan ternak tersebut dikonsumsi untuk dalam wilayah Kota Sabang, kecuali sapi, kerbau yang dijual keluar Aceh masing-masing sejumlah 1.344 ekor, 3.204 ekor, 352 ekor. Umumnya dari jenis hewan ternak tersebut yang dimanfaatkan adalah dagingnya, terutama untuk konsumsi daerah.

Sedangkan untuk ayam ras/petelur dan ayam pedaging, bibit dan obat-obatan, serta pakan masih didatangkan dari Nanggroe Aceh Darussalam.

Kegiatan pemeliharaan hewan ternak selain dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat juga dapat berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa masalah lingkungan yang ditimbulkan yaitu berkaitan dengan lokasi areal penggembalaan, pencemaran kotoran ternak, dan penyebaran penyakit manusia. Hingga saat hewan ternak yang di pelihara masih banyak yang berkeliaran di tempat-tempat umum yang bukan dipergunakan sebagai padang penggembalaan. Hal ini dapat merugikan tanaman yang dibudidaya dan juga kotorannya bertebaran kemana-mana sehingga mengurangi nilai estetika dan kesehatan masyarakat luas.

BAB VI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sabang merupakan salah satu wilayah yang mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat bervariasi. Salah satunya adalah Kegiatan sektor perikanan Kota Sabang dikelompokkan menjadi 2, yaitu kegiatan perikanan tangkap (*capture fishery*) dan kegiatan perikanan budidaya (*acuaculture fishery*). Kedua jenis kegiatan tersebut sangat berbeda, kegiatan yang pertama sangat tergantung pada keberadaan stok ikan yang terdapat diperairan alam dan hasilnya susah diprediksi; sedangkan kegiatan yang kedua tidak terlalu tergantung kepada stok ikan yang terdapat diperairan alam melainkan sudah dapat dibreeding dan dibesarkan pada tempat yang terkontrol sehingga hasilnya dapat diprediksi dengan tepat. Oleh sebab itu pada masa yang akan datang pengadaan ikan yang dilakukan baik diperairan/ kolam air tawar, payau, maupun air asin.



Gambar VI-1. Ekosistem Lingkungan

a. Perikanan Tangkap

Berdasarkan jenis-jenis ikan yang produksinya tercatat di dalam buku statistic diperkirakan ada 45 spesies. Namun jika dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis yang produksinya lebih besar atau sama dengan 1000 ton, maka dari seluruh wilayah Kota Sabang terdapat 27 spesies.

Jika ha tersebut diambil dari kelompok ikan yang termasuk produksinya sepuluh besar tertinggi, maka jenis ikan yang produksinya paling tinggi adalah ikan tongkol (456,50 ton), kemudian baru diikuti oleh ikan cakalang (391,70 ton), ikan teri (58,70 ton), ikan selar (19,80 ton), ikan kembung (39,00 ton) ikan tuna (80,20 ton) ikan biji nangka (21,60 ton), ikan cucut (25,23 ton), ikan tenggiri (19,70 ton). Meskipun

demikian informasi tersebut masih bersifat relatif, karena pendaratan ikan cenderung memilih pelabuhan yang memiliki daya serap pasar besar. Dengan demikian mungkin saja antara lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) dengan lokasi pendaratan ikan secara administrasi berbeda.

Dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, nelayan yang berada dalam wilayah Kota Sabang menggunakan sarana transportasi air yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) Perahu tanpa motor, (2) Motor temple, dan (3) Kapal motor. Jenis perahu tanpa motor dominan dipergunakan di Sabang.

Selain ikan produksi perikanan laut yang lain adalah berupa binatang berkulit keras dan binatang lunak. Yang termasuk ke dalam binatang berkulit keras seperti rajungan (*Portunus sp*), kepiting bakau (*Scylla sp*), udang barong (*Panulirus sp*), udang windu (*Paneus monodon*), udang putih (*Paneus merguieimsis*), udang dogol, dan udang lainnya. Sedangkan yang termasuk ke dalam binatang lunak seperti tiram, simping, remis, kerang darah, cumi-cumi, sotong, gurita, dan lainnya. Data produksi dari masing-masing kelompok organisme tersebut disajikan pada data sebenarnya masih ada produksi perikanan laut lainnya yang tidak tercatat datanya seperti teripang (*Holothuria sp*), kima (*Tridacna sp*), dan rumput laut (*Euchema sp*) yang pada umumnya banyak dihasilkan di daerah perairan Kota Sabang seperti Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Klah, dan Pulau Rondo.

b. Perikanan Budidaya

Kegiatan perikanan budidaya yang dilaksanakan masyarakat di wilayah Kota Sabang dapat dibedakan atas tiga, yaitu perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut.

• Air tawar

Jenis perikanan budidaya air tawar biasanya diusahakan pada lokasi dimana sumber air tawar tersedia dengan baik, seperti halnya di Kecamatan Sukakarya. Di daerah ini usaha budidaya dilakukan pada kolam-kolam, di perairan umum seperti danau (karamba), dan daerah persawahan, luas kolam, karamba, dan masing-masing mencapai daerah dua Kecamatan yang memiliki areal kolam yang luas yaitu (109 ha). Sedangkan untuk system karamba air tawar yaitu di (1.400 ha) yang terkonsentrasi di Danau Aneuk Laot dan selanjutnya sisa jumlah produksi ikan dari kegiatan budidaya di kolam mencapai 67,09 ton dalam setahun. Adapun jenis-jenis ikan yang umum di pelihara oleh pembudidaya ikan yaitu ikan mas (*Tilapia mossambica*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*) dan lele (*Clarias batrachus*).

Kegiatan budidaya ikan air tawar, baik yang dilakukan di kolam, keramba, maupun sawah selain bersifat positif (menghasilkan pendapatan bagi masyarakat) juga dapat menghasilkan limbah berupa pakan tambahan yang diberikan kepada ikan. Hal ini terutama sangat di rasakan efeknya pada kegiatan sistem keramba pada suatu perairan yang mengenang seperti Danau Aneuk Laot. Apabila pakan tambahan yang diberikan secara berlebihan maka sisanya akan mengendap di dasar perairan danau. Hal ini akan menyebabkan lapisan hipolimnion dari danau akan bersifat anaerob, karena oksigennya akan terpakai oleh proses dekomposisi dari bahan organik yang berasal dari pakan ikan. Dalam kondisi seperti biasanya akan berkembang senyawa gas yang bersifat toksin seperti ammonia, H₂S, dan CH₄ (menimbulkan bau busuk). Selanjutnya nutrient yang dilepaskan hasil dekomposisi tersebut dapat mempercepat proses eutrofikasi (penyuburan yang berlebihan) sehingga terjadi ledakan populasi fitoplankton tertentu (*Cyanophyceae*) atau vegetasi akuatik seperti enceng gondok (*Eichornia crassipes*) dan *Hydrilla*. Pada kondisi seperti itu proses evapotranspirasi dan sedimentasi akan meningkat sehingga umur dari suatu perairan akan menjadi semakin pendek.

- **Air Payau**

Kegiatan budidaya perikanan air payau dilakukan pada kolam-kolam di daerah pesisir yang disebut dengan tambak (*Brackishwater pond*). Dalam hal ini lokasi pengembangannya biasanya pada daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut dan tersedia suplai air tawar yang cukup, misalnya di muara sungai, alur, dan teluk yang banyak dijumpai vegetasi mangrove. Oleh sebab itu daerah tidak dapat di manfaatkan secara optimal.

Selain kegiatan budidaya tambak berdampak positif pada kegiatan ekonomi masyarakat, rupanya kegiatan ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Akibat perluasan areal mangrove yang tidak terkontrol menyebabkan areal hutan mangrove mengalami degradasi yang cepat, terutama di pantai utara dan timur. Pada hal ekologis dari ekosistem mangrove sangat besar bagi lingkungan di wilayah pesisir, yaitu sebagai lokasi tempat mencari makan (*Feeding ground*) dan pembesaran (*nursery ground*) bagi berbagai jenis larva ikan yang bernilai ekonomis, pelindung pantai dari erosi, pencegah intrusi air laut, dan memperbaiki kondisi kualitas air. Selain itu akibat penggunaan pestisida dan pakan udang yang tidak terkontrol menyebabkan kondisi lingkungan di daerah pesisir menjadi semakin rusak sehingga produktivitas perairan yang berada di sekitarnya mengalami penurunan.

BAB VII

PESISIR DAN LAUT

Wilayah pesisir merupakan suatu daerah dengan laut, sedangkan wilayah lautan yaitu daerah tegak lurus terhadap garis pantai pada kondisi surut terendah sejauh 12 mil laut (laut teritorial) hingga mencapai 200 mil laut (laut Zona Ekonomi Eksklusif). Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2000, wilayah Yuridis perairan laut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mencapai sejauh 12 mil laut, sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya sejauh 4 mil laut. Beberapa wilayah Administrasi yang memiliki wilayah pesisir dan langsung berbatasan dengan laut yaitu Kota Sabang. Berarti hanya dua Kabupaten yang tidak memiliki daerah pesisir yang dapat digolongkan sebagai daerah pedalaman (*Inland Areas*).



Gambar VII-1. Salah Satu Wilayah Pesisir di Kota Sabang

Pada wilayah pesisir terdapat beberapa jenis ekosistem mangrove, terumbu karang, rumput laut, pantai, dan laut dalam. Keberadaan masing-masing ekosistem utama tersebut kenyataanya berbeda. Berdasarkan ekosistem utama tersebut saling berinteraksi sehingga secara konprehensif sangat menentukan keberadaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan.

Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove berada pada daerah intertidal yang sangat dipengaruhi oleh fenomena pasang surut (Pasu). Ekosistem ini memiliki substrat dasar yang berlumpur dan biasanya banyak di jumpai pada muara-muara sungai (estuaria) yang besar, pantai teluk yang dangkal, delta, dan daerah pantai yang terlindungi, baik yang

terdapat pada daratan induk pulau Sumatera (Pantai Timur, maupun pulau-pulau kecil).

Pada ekosistem mangrove dijumpai berbagai jenis vegetasi yang mampu beradaptasi terhadap kondisi tanah yang bersifat anaerob, seperti *Avicenia alba*, *Brugiera cylindrica*, *Ceriop tagal*, *Rhizophora apiculata*, dan *Nypa fruticans*. Selain vegetasi tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung (*Direct benefit*) sebagai bahan kayu bangunan, atap rumah, pemuat arang, penghasil gula, obat-obatan, dan bahan baku industri kertas, vegetasi mangrove juga berperan besar dalam mensuplai bahan organik ke lingkungan perairan. Bahan organik tersebut kemudian mengalami proses dekomposisi yang melibatkan organisme dekomposer dalam sistem rantai makanan detritus (*Detrital food chain*). Oleh sebab itu pada rantai dasar perairan di ekosistem mangrove biasanya memiliki kelimpahan organisme yang tinggi berupa fungi, bakteri, algae, cacing polychaeta, crustacean, dan molusca. Berbagai jenis organisme tersebut merupakan sumber makanan alami yang baik bagi berbagai jenis larva udang dan ikan yang bernilai ekonomis penting, seperti udang putih (*Penaeus merguensis*), udang windu (*Penaeus monodon*), ikan kakap (*Lutjanus sp*), ikan belanak (*Mugil sp*), ikan bandeng (*Chanos chanos*), dan ikan kerapu (*Epinephelus sp*). Disamping makanan tersedia, struktur akar yang khas (akar tunggang, lutut, dan pasak) dan kondisi air yang bersifat payau memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi larva udang dan ikan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu daerah perairan mangrove berfungsi sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*) dan daerah pembesaran (*nursery ground*).

Selain itu detritus organik yang terbawa oleh aliran sungai terutama pada waktu surut dapat menyumbangkan nutrisi ke lingkungan perairan pantai sehingga produktivitasnya meningkat. Luas areal hutan mangrove di Kota Sabang pada tahun 2003 menurut Dinas Kehutanan seluas 18 ha dan areal dominan berada di pesisir pantai. Kondisi ekosistem mangrove pada berbagai daerah kabupaten dalam wilayah perairan dapat digolongkan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, seperti yang disajikan pada data analisa. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2003 luas hutan mangrove yang masih bagus hanya tinggal 8,5 ha; rusak sedangkan yang rusak berat seluas 9,5 ha. Daerah yang hutan mangrovenya mengalami tingkat kerusakan sedang yang paling luas daerah Kecamatan Sukajaya. Sumber kerusakan akibat perluasan areal tambak; pengambilan kayu bakau untuk dijadikan arang, bahan bangunan, dan serta pengalihan untuk lahan pemukiman, industri, dan pelabuhan / dermaga laut. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan akibat perubahan kualitas air, baik oleh bahan pencemar (minyak dan pestisida) maupun akibat air laut. Tumpahan bahan pencemar minyak dapat menutupi

lentisel atau pneumatophore sehingga pernafasannya terganggu yang dapat menyebabkan kematian, disamping kedua bahan polutan tersebut bersifat racun. Sedangkan intrusi air laut dapat menyebabkan salinitas perairan meningkat sehingga dapat menghambat distribusi dari spesies mangrove tertentu. Pengaruh ini sangat dirasakan pada sungai-sungai besar yang debitnya menurun secara drastis akibat penggundulan hutan daerah atas (*upland area*) atau pengalihan sejumlah volume air ke tempat lain atau digunakan untuk mengairi lahan persawahan.

Apabila luasan hutan mangrove terus berkurang akibat arealnya dikonversi untuk kebutuhan yang lain atau pohonnya ditebang untuk diambil kayunya maka hal ini akan berbahaya terhadap lingkungan di wilayah pesisir dan lautan. Fungsi ekologisnya yang sangat besar akan mengecil atau hilang sama sekali, yaitu mencegah terjadinya erosi dan intrusi air laut, daerah pembesaran (*nursery ground*), dan daerah tempat mencari makan (*Feeding ground*). Selanjutnya produktivitas perairan pantai akan menurun karena minimnya suplai nutrient dan regenerasi stok ikan berjalan lambat. Hal ini akan berdampak pada jumlah hasil tangkapan nelayan sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan yang mereka peroleh.

Hingga saat ini belum terlihat adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan dari ekosistem mangrove. Bahkan areal tambak kurang produktif yang telah dibuka hingga saat ini masih ditelantarkan. Oleh sebab itu melalui instansi terkait (Dinas kehutanan, Dinas perikanan, Dinas pariwisata, dan kantor Bapedalda) perlu bersama-sama memikirkan tentang hal ini sehingga konsep pengelolaannya dapat segera diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Ekosistem Terumbu karang

Berbeda dengan ekosistem mangrove yang keberadaannya terkonsentrasi pada daerah yang berdekatan dengan muara sungai, di daerah teluk, dan delta; maka ekosistem terumbu karang justru berada jauh dari pengaruh air tawar yang berasal dari sungai dan sedimentasi dan berada pada daerah subtidal. Pada daerah peralihan antara habitat mangrove dengan terumbu karang sering di jumpai juga ekosistem padang lamun. Ekosistem ini dapat memanfaatkan nutrient yang berasal dari daerah mangrove dan sekaligus dapat memfilter sedimen yang berlebihan masuk ke ekosistem terumbu karang. Oleh sebab itu lokasi keberadaan ekosistem padang lamun biasanya relatif berdekatan dengan habitat terumbu karang sehingga dapat berinteraksi secara intensif.

Ekosistem terumbu karang yang di jumpai di wilayah perairan pantai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya berupa karang tepi (*fringing reef*) yang berada pada kedalaman 5-10 meter di sebagian besar dari pulau-pulau kecil. Ekosistem

terumbu karang yang sudah dikukuhkan dalam bentuk kawasan adalah Taman Laut Pulau Weh seluas 2600 Ha (SK Menteri Kehutanan No.928/Kpts/Um/ 2/1982, tanggal 22 Desember 1982). Yang arealnya terkonsentrasi di Pulau Rubiah dan sekitarnya. Areal yang dilindungi ekosistem terumbu karangnya mencapai luas 227.500 Ha. Seperti yang disajikan pada data Kehutanan.



Gambar. VII-2. Keindahan Terumbu Karang

Terumbu karang terbentuk dari endapan – endapan pasir terutama kalsium bikarbonat yang dihasilkan oleh organisme karang (dari *filum Scnedaria*, *klas Anthozoa*, *ordo Madreporaria Scleractina*), alga berkapur, dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat (Nybakken, 1992). Terumbu karang termasuk kelas Anthozoa, yang berarti hewan berbentuk bunga (Antho artinya bunga; zoa artinya hewan). Hewan ini terdiri dari family *Pocilloporiidae*, *Acroporidae*, *Agaricidae*, *Thamnasteridae*, *Siderasteridae*, *Fungiidae*, *Portidae*, *Trachyphyidae*, *Oculidae*, *Mandrinidae*, *Meriliunidae*, *Dendrophilidae*, dan *Helioporidae*. Secara keseluruhan jumlah spesies terumbu karang yang dijumpai di Indo Pasifik ada 390 jenis (Backhuys, 1990). Polip karang bertubuh lunak, mempunyai mulut pada bagian atas yang dikelilingi oleh lengan-lengan (tentakel) yang dijulurkan pada waktu malam hari. Makanan karang berasal dari tiga sumber, yaitu (1) Plankton yang ditangkap melalui tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat pelumpuh mangsa (Nematocysts); (2) Nutrisi organik yang diserap langsung dari dalam air; (3) Komposisi organik yang dihasilkan *zooxanthellae*. Dalam proses pembentukan karang terjadi hubungan saling menguntungkan antara polip karang dan *zooxanthellae*. Ketika menerima cahaya matahari, *zooxanthellae* menghasilkan oksigen dan nutrisi yang terdiri dari glicerol, glukosa, dan asam amino yang melekat di lapisan luar polip karang. Sedangkan polip karang memberikan tempat hidup dan juga CO₂ untuk digunakan pada proses fotosintesa.

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang tinggi, yang disebabkan oleh kemampuan terumbu untuk menahan nutrient di dalam system. Setiap nutrient yang dihasilkan oleh karang sebagai hasil metabolisme dapat dipergunakan langsung oleh tumbuhan tanpa mengedarkanya terlebih dahulu ke dalam perairan (Nybakken, 1992). Nilai produktivitas terumbu karang berkisar 300 s/d 5.000 g cm⁻² tahun⁻¹, lebih tinggi dari ekosistem di sekitarnya, yaitu hanya sebesar 20 s/d 40 g cm⁻² tahun⁻¹ (Lewis dalam Meadows and Campbell, 1993).



Gambar.VII-3 Pendataan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Kota Sabang

Ekosistem terumbu karang berperan dalam mengatur proses-proses ekologis seperti penyedia nutrient bagi biota perairan, pelindung fisik pantai, tempat pemijahan, tempat bermain, dan asuhan biota perairan. Terumbu karang diidentifikasi sebagai sumber daya yang memiliki nilai konservasi yang tinggi karena memiliki keanekaragaman biologis yang sangat tinggi (mega biodiversity), keindahan, dan menyediakan sumber plasma nutfah (Hatcher dkk dalam Sawyer, 1992). Nilai ekonomis dari terumbu karang yaitu setengah dari nilai ekonomis hutan tropika basah, yaitu sebesar US \$ 1.500 km²/tahun (Ruinteenbeek dalam Sawyer, 1992).

Pada saat ini ekosistem terumbu karang di Kota Sabang telah mengalami kerusakan akibat penggunaan bom, potassium sianida, alat tangkap trawl, dan pengambilan masyarakat untuk bahan bangunan. Tingkat kerusakan ekosistem terumbu karangnya telah mencapai 50-75 % (Halim et ai, 2001). Sedangkan di sekitar pulau Rubiah, Kota Sabang tingkat kerusakan ekosistem terumbu karangnya berkisar 38-44,25 % (PPLH-SDA Unsyiah, 2002). Selain yang sudah disebutkan di atas, penyebab lain yang menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang disini yaitu alat tangkap jaring, pariwisata, limbah domestik, dan pengaruh alam (ombak dan El-Nino) dan akibat yang paling parah terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang

di kota sabang adalah akibat terjangan gelombang tsunami. Apabila kerusakan tersebut terus berlangsung maka dikuatirkan laju pemulihannya tidak dapat mengimbangi tingkat kerusakan yang terjadi sehingga nilai benefitnya (langsung maupun tidak langsung) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat luas yang berada di wilayah pesisir. Disamping itu pula karena disini banyak di jumpai berbagai organisme yang hidup besimbiosis, seperti fungi, bakteri, mikro algae, ikan crustacean, echidermata, dan biota akuatik lainnya maka hal ini merupakan asset yang sangat berharga untuk di jadikan sebagai biokatalis dalam menunjang perkembangan bioteknologi kelautan di masa yang akan datang. Dalam hal ini penerapan bioteknologi kelautan bertujuan untuk menghasilkan produk alami sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, dan makanan bergizi tinggi; pengolahan limbah (*bioremediasi*), pengembangan akuakultur, dan pengendalian biofouling. Hal yang tidak kalah pentingnya, dengan terjadinya kerusakan terumbu karang maka keindahan pemandangan di bawah laut akan berkurang atau hilang sama sekali sehingga akan berdampak pada aktivitas kunjungan turis manca negara yang sering melakukan *diving* atau *snorkeling*, misalnya di pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo, serta Pulau Klah. Dampak lanjutannya yaitu pendapatan masyarakat akan menurun drastis, misalnya para penyewa bungalow, pemilik restaurant dan stingray (penyewa peralatan selam), warung kopi, kios, dan penyewa boat wisata.

Wilayah Kota Sabang yang memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar yaitu d kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Disini kaya akan berbagai jenis objek wisata bahari dan wisata alam lainnya, seperti Taman laut Pulau Rubiah, Pantai Pasir Putih di Pulau Aceh, Pantai Kasih Sabang, Pulau Klah, dan Air Terjun di Pria Laot Sabang. Berbagai jenis objek wisata tersebut kondisinya masih sangat alamiah dan indah sehingga dapat dijadikan modal wisata yang handal. Disamping itu juga di jumpai di kawasan Pantai barat dan timur. Berbagai jenis modal wisata tersebut apabila dilengkapi dengan atraksi wisata (kebudayaan setempat) dan benda wisata (souvenir yang spesifik) dapat menjadi unsur "*pemika*" yang jitu sehingga dapat mengiring para turis yang masuk melalui Medan atau langsung ke Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pada tahun 2003 jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung ke Sabang hampir tidak ada karena keadaan yang tidak kondusif, tetapi untuk saat ini seiring denngan kondisi yang membaik, maka jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di sabang menjadi semakin meningkat. Juga singgahnya kapal pesiar berlabuh sebentar seperti kapal MV. Columbus, MV. Europa, dan MV. Maxim Gorkiy yang berbendera Bahamas.

Hingga saat ini upaya perbaikan terhadap ekosistem terumbu karang yang telah rusak belum banyak dilakukan, baik oleh Pemerintah, maupun masyarakat setempat. Upaya mencegah kegiatan pengeboman dan penggunaan bahan beracun agak susah dilakukan mengingat status perekonomian masyarakat relatif sangat rendah sementara material bangunan yang sebenarnya harganya relatif mahal di daerah kepulauan. Meskipun demikian sudah ada juga upaya yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dengan melakukan perbaikan ekosistem dengan melibatkan masyarakat, yaitu melalui pembuatan terumbu buatan dan pengembangan usaha alternatif di Kepulauan Banyak. Terumbu buatan tersebut dapat mencegah meluasnya kerusakan ekosistem terumbu karang dan sekaligus berfungsi sebagai rumpun.

BAB VIII

AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Peristiwa gempa dan tsunami di akhir tahun 2004 telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kondisi lingkungan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena sebahagian wilayahnya terkena dampa gelombang tsunami. Khususnya Kota Sabang yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengalami perubahan kondisi lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka Pemerintah Kota Sabang khususnya bidang pengelolaan lingkungan harus mempunyai agenda yang jelas dan transparan dalam rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan yang telah rusak sehingga akan mempunyai fungsi yang sama dan bahkan menjadi lebih baik dari pada kondisi lingkungan sebelumnya. Salah satunya adalah dengan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kota Sabang. Sasaran yang ingin dicapai dalam Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup in adalah pulihnya kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang telah rusak, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, mempertahankan kondisi sumber daya alam melauai perbaikan dan pengendalian faktor-faktor yang mengacu terjadinya kerusakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka prioritas Kebijakan Pembangunan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Wilayah Kota Sabang adalah daerah yang di dominasi oleh perbukitan sehingga erosi tebing dan longsor pada saat hujan akan sangat mungkin terjadi. Kejadian longsor yang dapat mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan yang di jumpai di dua kecamatan adalah disebabkan oleh erosi tebing tekanan air perbukitan (*Streambank erosion*), terutama yang dapat diamati pada alur dapat dirubah juga menjadi tanah longsor di dearah ini ketika permukaan pasang surut air laut surut (meningkatnya gaya tarik kebawah) sementara pada saat bersamaan tanah tebing sungai telah jenuh. Dengan demikian, longSORan tebing sungai terjadi setelah debit aliran besar berakhir atau surut. Proses terjadinya erosi tebing sungai yang kedua lebih ditentukan oleh keadaan kelembaban tanah di tebing sungai menjelang terjadinya erosi. Dengan kata lain, erosi tebing sungai dalam bentuk longSORan tanah terjadi karena beban meningkat oleh adanya kelembaban tanah yang tinggi dan beban ini lebih besar dari pada gaya yang mempertahankan tanah tetap pada tempatnya (Hooke, 1979). Untuk mengendalikannya telah dilakukan pengedaman

di beberapa titik tebing yang di perkirakan rawan longsor seperti di Balohan, Aneuk Laot, Anoi Itam dan Krueng Raya.

Beberapa akibat abrasi pantai yang telah terjadi adalah di kawasan Berawang, Anoi Itam, dan Pantai Paradiso.

Pada titik pengamatan pertama yaitu desa Anoi itam dan Kelurahan Balohan pada altitude 211 m di atas permukaan laut, tepatnya pada latitude 03^o 33' 13" LU, 97^o 46' 33" BT. Pada lokasi ini alur Elevasi ketika Degradasi tebing tahun 2002 lalu terjadinya erosi tebing yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian (sawah dan tegalan). Tanaman pertanian yang masih tinggal adalah tanaman kelapa (*Cocos nucifera*) di samping semak belukar, sedangkan sebahagian besar lahan ini tertimbun pasir dan batu, sehingga tidak dapat diolah lagi untuk budidaya tanaman semusim.

Erosi tebing terjadi sampai mendekati jalur jalan Balohan dan jalan tembus Paya Keuneukai long angin dimana tiga meter lagi mengenai badan jalan ini. Usaha perbaikan yang telah dilakukan adalah dibangunnya penghambat aliran air pada pinggiran jalan dalam break water (talud) penggarapan aliran air tidak akan membahayakan badan jalan. Lokasi dan kerusakan yang terjadi akibat erosi tebing dan degradasi tebing mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan.

2. Pengelolaan dan Konservasi sumber-sumber daya air;

Pengelolaan dan Konservasi Sumber-sumber daya air harus mendapat prioritas utama pemerintah daerah karena ketersediaan air merupakan issue utama yang selalu menjadi perhatian utama di Kota Sabang. Hal ini disebabkan oleh sangat ketergantungan kepada Danau Aneuk Laot yang merupakan sumber air terbesar yang dipunyai oleh Kota Sabang. Kondisi volume air dari tahun ketahun terus mengalami penyusutan. Beberapa agenda yang sedang dan akan dilaksanakan adalah Pemasangan Bronjong di sekitar Danau Aneuk Laot untuk mengurangi sedimentasi akibat erosi tanah pada saat hujan. Bronjong Danau Aneuk Laot adalah berupa penahan infiltrasi sederhana terbuat dari bronjong batu dengan panjang lebih kurang 200 m. Dan pada tahun 2005 dilakukan pemasangan lanjutan bronjong sepanjang 100 m. Pengaman limbah domestik dan degradasi tebing dibuat tumpukan batu sepanjang tepi sempadan danau pada koordinat tersebut dan air yang mengalir ke danau tetap dengan debit yang sangat kecil, sedangkan aliran air limbah deterjen rumah tangga masih terjadi.

Bila musim hujan tiba dikhawatirkan aliran air yang menuju ke danau aneuk laot ini akan menjadi tinggi di bahagian hilir alur ini pasti tidak terelakan. Karena bendung bronjong yang rendah dan tidak kokoh pada bekas water intake yang pada saat ini

masih dilewati air akan tergeser dan kekuatan air akan menggeserkan posisinya, air akan melimpah dengan aliran yang lebih tinggi.

Tanah yang peka terhadap longsor, yaitu tanah dengan tekstur kasar. Kemudian alur sungai yang tidak teratur dengan banyaknya rintangan seperti tanggul pencegah tanah longsor, dapat mempertajam kelokan sungai dan menjadi penyebab utama erosi sepanjang tebing sungai. Bagian tebing sungai yang mempunyai potensi besar untuk terjadi erosi adalah pada tikungan-tikungan sungai karena gaya benturan aliran sungai di tempat tersebut adalah besar. Dalam hubungan ini Hooke (1979) membedakan tiga faktor penyebab terjadinya erosi tebing sungai berdasarkan karakteristik fisik tebing sungai sebagai berikut :

1. Erosi tebing danau yang sebahagian besar disebabkan oleh adanya terusan aliran sungai, dalam hal ini pengaruh debit puncak terhadap terjadinya erosi adalah besar.
2. Tebing danau dengan karakteristik tanah terdiri dari bahan berpasir dengan kelembaban tinggi. Erosi tebing sungai yang terjadi umumnya dalam bentuk tanah longsor.
3. Tebing sungai dengan karakteristik tanah solid (mempunyai resistensi tinggi terhadap pengelupasan partikel tanah). Erosi dalam skala lebih kecil, umumnya terjadi oleh adanya penghancuran tebing sungai atau ketika berlangsung debit aliran besar.

Selain itu juga telah dilakukan pembebasan lahan disekitar wilayah danau Aneuk Laot untuk memperluas daerah tangkapan air dengan penanaman tumbuhan yang akan menampung air dan memperkuat struktur tanah di daerah sekitar danau.

3. Pencegahan kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup;

Di Kota Sabang erosi tanah mempengaruhi produktivitas lahan kering yang biasanya mendominasi daerah yang memiliki kemiringan serta bagian hulu dan juga telah memberikan dampak negatif di daerah Danau Aneuk Laot di bagian hilir. Secara umum, terjadinya erosi ditentukan oleh faktor-faktor iklim (terutama intensitas hujan), topografi, karakteristik tanah, vegetasi daerah tangkapan air, dan tata guna lahan. Kalau dilihat kembali faktor-faktor tersebut maka ancaman bahaya atau erosi di kecamatan Sukajaya sangat besar sekali, mengingat daerah yang sebahagian besar adalah mempunyai topografi berbukit dan bergunung, terutama yang terdapat di bagian tengah, dengan curah hujan yang tinggi, dan kerusakan hutan yang terjadi sejak lama.



Gambar. VIII-1 Dinding Tebing Yang harus di Dam

Meluasnya penebangan hutan untuk produksi kayu untuk pemukiman penduduk, dan untuk ladang atau kebun telah menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan terhadap lingkungan hidup Kota Sabang. Laporan-laporan hasil penelitian menunjukkan bahwa laju erosi telah mengalami peningkatan beberapa kali hanya dalam waktu kurang dari satu dekade, tidak berfungsinya bangunan-bangunan irigasi di daerah hilir sebagai akibat proses sedimentasi yang terus meningkat dan semakin seringnya bencana banjir telah mendorong lebih dipercepatnya keharusan program rehabilitasi lahan, terutama di daerah hulu daerah aliran danau beberapa ini. Salah satu usaha yang tepat untuk dilakukan dalam rangka menghindari keberlanjutan kerusakan lahan karena erosi dan longsor serta meluasnya lahan kritis adalah dengan melakukan pengelolaan.

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

Keberhasilan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga diperlukan adanya peran serta masyarakat. Untuk itu maka perlu peningkatan kesadaran dan pengertian tentang pembangunan berkelanjutan dan mendorong masyarakat untuk berinisiatif berwawasan lingkungan dengan memberi insentif dan disistensif.

5. Pengelolaan danau secara Berkelanjutan.

Danau aneuk laot dengan luas permukaannya 384.283 m² dan luas daerah tangkapan airnya (*catchment area*) mencapai 4.896.283 m² adalah fitur landsap yang sangat indah dan luas dan ekspresif. Danau mempunyai ragam yang banyak dibandingkan dengan perairan darat lainnya, jika sungai merupakan sistem air yang mengalir, maka danau merupakan cadangan air yang diam disuatu tempat

dengan ukuran, bentuk dan kedalaman yang sangat bervariasi, tergantung dari proses pembentukannya.

Pengelolaan dan konservasi danau untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah suatu proses dinamis yang didasarkan kepada konsep pengelolaan sumber daya air secara terpadu antara daerah tangkapan air dengan badan airnya. Dalam hal pemanfaatan ruang darat yang dapat memberikan dampak langsung kepada badan airnya berupa sedimentasi dan erosi serta pencemaran, sehingga interaksi spasial dan interaksi kegiatan menjadi sesuatu hal utama yang harus menjadi dasar pengelolaan lingkungan untuk menuju keberlanjutan fungsi danau secara totalitas ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2006, **Panduan Penyusunan SLHD Provinsi dan Kabupaten Kota.**

Muffti Madjid, Dipl. HE, Ir, **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan**, Banda Aceh

Ricki, M.Mulia, 2005, **Kesehatan Lingkungan**, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tim BPPT, 2005, **Geo Investasi Danau Aneuk Laot Kota Sabang**, Sabang.

Srikandi, F. 1992, **Polusi air dan Udara**, Kanisius, Yogyakarta.

_____, 2005, **Sabang dalam angka 2005**, Bappeda Kota Sabang.